PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LKIP

TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan salah satu misi pembangungan Provinsi DKI Jakarta, untuk mewujudkan "Jakarta Baru" secara umum pengelolaan organisasi publik terdiri dari 4 (empat) pilar utama yaitu meningkatkan partisipasi, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Dengan perbaikan di keempat pilar tersebut, diharapkan organisasi publik dapat menjaga keselarasannya antara strategi, proses bisnis, kemampuan pegawai dan kebutuhan dari *stakeholders* sehingga mampu menjadi suatu organisasi yang berkinerja tinggi.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu fondasi untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun komponen-komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut mulai dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan, diharapkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diukur dan dinilai oleh masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ini menyajikan mengenai capaian kinerja, pembangunan baik makro maupun mikro Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabillitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Semoga Tuhan Memberkati Kita semua.

Jakarta, Maret 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Anies Baswedan, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK ix
IKHTISAR EKSEKUTIF x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang I-1
B. Manfaat dan Tujuan I-2
C. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta I-2
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta I-3
E. Susunan Organisasi Perangkat Daerah I-6
F. Personil Pegawai I-7
G. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta I-9
H. Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2017 ..... I-11
I. Sistematika Penyusunan I-17

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2013-2017 ..... II-1
1. Pernyataan Visi II-1
2. Pernyataan Misi II-2
3. Tujuan Strategis II-2
4. Sasaran Strategis II-4
B. Perjanjian Kinerja II-7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja III-1
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah III-5
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat III-17
3. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat III-21
4. Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar kepada korban bencana III-22

5. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan III-26
6. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam melakukan pengelolaan sampah ... III-31
7. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja III-33
8. Meningkatnya kurikulum pelatihan keterampilan pusat pelatihan kerja (PPK) sesuai dengan kebutuhan pasar kerja III-36
9. Tersedianya Sistem Tata Air yang Optimal dalam Mendukung Upaya Pengendalian Banjir, Banjir ROB dan Dampak Perubahan Iklim Lainnya III-39
10. Tersedianya jaringan jalan dan trotoar dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota III-43
11. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang III-46
12. Meningkatnya ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran, perdagangan dan permukiman... III-51
13. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan III-53
14. Berkurangnya tingkat resiko/efek negatif akibat kebakaran..... III-57
15. Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi..... III-59
16. Meningkatnya intensitas dan inovasi promosi pariwisata..... III-67
17. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat..... III-71
18. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi..... III-82
19. Meningkatnya investasi daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung perekonomian daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip Good Governance III-85

20. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota III-87
B. Realisasi Anggaran III-90

BAB IV PENUTUP

Penutup IV-1

LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA
B. CAPAIAN KINERJA

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	I.3
TABEL I.2	Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2017, Tahun 2017 dan tahun ke tahun menurut kelompok pengeluaran	I.12
TABEL I.3	Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi, Desember 2017 untuk 82 kota	I.13
TABEL I.4	Ekspor melalui Provinsi DKI Jakarta Bulan November 2017	I.14
TABEL I.5	Nilai Ekspor Produksi DKI Jakarta untuk beberapa periode	I.14
TABEL I.6	Nilai Impor melalui DKI Jakarta menurut Golongan Barang HS 2 Dijit, Desember 2017	I.15
TABEL I.7	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin September 2016-2017	I.17
TABEL I.8	Perkembangan Indeks Kedalaman, Kemiskinan (P1) dan Indeks Kemiskinan (P2) di Provinsi DKI Jakarta Maret 2013-september 2017	I.18
TABEL II.1	Indikator Ekonomi Makro dan Sosial	II.7
TABEL II.2	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017	II.9
TABEL III.1	Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017	III.1
TABEL III.2	Data Proyeksi Ekonomi Makro dan Sosial Tahun 2017	III.3
TABEL III.3	Rincian Penilaian dan Perbandingan SAKIP	III.6
TABEL III.4	Program Terkait Indikator	III.15
TABEL III.5	Kegiatan Pendukung Program	III.15
TABEL III.6	Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016	III.17
TABEL III.7	program sasaran strategis Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	III.17
TABEL III.8	Kegiatan pendukung program	III.17
TABEL III.9	Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016	III.20
TABEL III.10	Program Sasaran Strategis	III.21
TABEL III.11	kegiatan pendukung program	III.22
TABEL III.12	Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016	III.22

TABEL III.13 program sasaran strategis Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar kepada korban bencana III.23
TABEL III.14 kegiatan pendukung program..... III.23
TABEL III.15 Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016 ..... III.25

TABEL III.16 program sasaran strategis Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan..... III.27
TABEL III.17 kegiatan pendukung program..... III.27
TABEL III.18 Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016 ..... III.30
TABEL III.19 Data timbulan sampah provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ... III.30
TABEL III.20 Data laporan penimbangan sampah di TPST Bantargebang Tahun 2017..... III.30

TABEL III.21 Program sasaran strategis meningkatnyan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam melakukan pengelolaan sampah..... III.31
TABEL III.22 kegiatan program pendukung..... III.31
TABEL III.23 Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016 ..... III.32

TABEL III.24 Program sasaran strategis meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja..... III.34
TABEL III.25 kegiatan program pendukung..... III.35
TABEL III.26 Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016 ..... III.35

TABEL III.27 Program sasaran strategis meningkatnya kurikulum pelatihan keterampilan pusat pelatihan kerja (PPK) sesuai dengan kebutuhan pasar kerja III.36
TABEL III.28 kegiatan program pendukung..... III.36
TABEL III.29 Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016 ..... III.38

TABEL III.30 Program sasaran strategis Tersedianya Sistem Tata Air yang Optimal dalam Mendukung Upaya Pengendalian Banjir, Banjir ROB dan Dampak Perubahan Iklim Lainnya..... III.40
TABEL III.31 kegiatan program pendukung..... III.40
TABEL III.32 Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016 ..... III.42

TABEL III.33 Program sasaran strategis Tersedianya Jaringan Jalan dan Trotoar dengan Kualitas yang Mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota III.43
TABEL III.34 kegiatan program pendukung III.44
TABEL III.35 kondisi jalan mantap provinsi dki Jakarta tahun 2017 ..... III.45
TABEL III.36 Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016 ..... III.46

TABEL III.37 Program sasaran strategis Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang III.46
TABEL III.38 kegiatan program pendukung III.47
TABEL III.39 Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016 ..... III.49

TABEL III.40 Program sasaran strategis Meningkatnya ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran, perdagangan dan permukiman III.51
TABEL III.41 kegiatan program pendukung III.52
TABEL III.42 Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016 ..... III.53

TABEL III.43 Program sasaran strategis Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan III.53
TABEL III.44 kegiatan program pendukung III.54
TABEL III.45 Jumlah laporan dari media sosial III.55
TABEL III.46 Jumlah laporan melalui media Qlue masing-masing wilayah III.55
TABEL III.47 Jumlah laporan melalui media Qlue berdasarkan status laporan III.56
TABEL III.48 Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016 ..... III.57

TABEL III.49 Program sasaran strategis Berkurangnya tingkat risiko/efek negatif akibat kebakaran III.58
TABEL III.50 kegiatan program pendukung III.58
TABEL III.51 Target realisasi capaian 2017 dan perbandingan tahun 2016 ..... III.59

TABEL III.52 Program sasaran strategis Meningkatnya Investasi Daerah yang Berkualitas dan Selektif untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Lebih

Efisien, Efektif dan Inklusif dengan tetap Menggunakan Prinsip Good Governance III.60
TABEL III.53 Target realisasi capaian dan perbandingan tahun sebelumnya III.60
TABEL III.54 target realisasi capaian anggaran III.65
TABEL III.55 Program sasaran strategis meningkatnya intensitas dan inovasi promosi pariwisata III.68
TABEL III.56 kegiatan program pendukung III.69
TABEL III.57 Target realisasi capaian dan perbandingan tahun sebelumnya III.70
TABEL III.58 Program sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat III.71
TABEL III.59 kegiatan program pendukung III.71
TABEL III.60 jenis perizinan yang sudah online III.73
TABEL III.61 Target realisasi capaian dan perbandingan tahun sebelumnya III.82
TABEL III.62 Program sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi III.82
TABEL III.63 kegiatan program pendukung III.83
TABEL III.64 Target realisasi capaian dan perbandingan tahun sebelumnya III.85
TABEL III.65 Program sasaran strategis Meningkatnya investasi daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung perekonomian daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip good governance III.86
TABEL III.66 kegiatan program pendukung III.86
TABEL III.67 Target realisasi capaian dan perbandingan tahun sebelumnya III.86
TABEL III.68 Program sasaran strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota III.87
TABEL III.69 kegiatan program pendukung III.87
TABEL III.70 Target realisasi capaian dan perbandingan tahun sebelumnya III.88
TABEL III.71 Realisasi Anggaran IKU Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ..... III.90

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK I.1	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin	I.7
GRAFIK I.2	Jumlah PNS berdasarkan Usia.....	I.7
GRAFIK I.3	Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan.....	I.8
GRAFIK I.4	Jumlah PNS berdasarkan Penempatan	I.8
GRAFIK I.5	Perkembangan Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 Desember 2017	I.11
GRAFIK I.6	Perkembangan Gini Ratio, September 2016 -2017.....	I.16
GRAFIK III.1	Kejadian Bencana selama tahun 2017.....	III.24
GRAFIK III.2	Pendistribusian logistik berdasarkan jenis kejadian bencana pada tahun 2017.....	III.25
GRAFIK III.3	Realisasi capaian Penumpang	III.48
GRAFIK III.4	Perizinan Elektronik tingkat Provinsi Tahun 2017.....	III.80
GRAFIK III.5	Perizinan Elektronik Kewenangan PTSP Kota/Kabupaten	III.80
GRAFIK III.6	Perizinan Elektronik Kewenangan PTSP Kecamatan.....	III.81
GRAFIK III.7	Perizinan Elektronik Kewenangan PTSP Kelurahan	III.81

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Penyelenggara Pemerintahan ditingkat Provinsi Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ini memiliki 2 (dua) fungsi yaitu :

1. Laporan Kinerja Ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat; dan
2. Informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan visinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 (lima) visi, yaitu:

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain;
3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota;
4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam mencapai Visi dan Misi tersebut, Provinsi DKI Jakarta menetapkan 11 (sebelas) tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2013-2017, yaitu:

1. mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khasnya didukung sarana dan prasarana yang memadai;
2. mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan;
3. menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun;
4. mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim;
5. menyediakan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
6. mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal;
7. menjadikan masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota;
8. mendorong penyelenggaraa pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan;
9. meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat;
10. meningkatkan kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat; dan
11. mengendalikan pertumbuhan penduduk alami.

Untuk mencapai tujuan strategis diatas, dalam tahun 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merumuskan 20 (dua puluh) sasaran strategis sebagai indikator kinerja utama dan penetapan indikator kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mampu melihat capaian kinerja tahun 2017. LKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Ukuran keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewajiban ini terdiri dari indikator makro ekonomi dan sosial dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan peran Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai standar kehidupan kota yang lebih baik. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 30 (tiga puluh) IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Namun demikian terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan revisi dikarenakan indikator tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaannya dan indikator tersebut juga belum memenuhi kriteria *SMART (spesific, measurable, attainable, relevan, timely)*.

Adapun hasil capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				
	1	Mendorong Peningkatan Predikat LKIP	BB	B	75%
	2	Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP (2016)	Proses Pemeriksa-an LKPD oleh BPK
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas kesehatan masyarakat				
	1	Angka kematian ibu	30 orang per 100.000 kelahiran hidup	45.03 orang per 100.000 kelahiran hidup	N/A
	2	Angka kematian bayi	7,10 bayi per 1000 kelahiran hidup	2,53 bayi per 1000 kelahiran hidup	N/A
	3	Angka Usia Harapan Hidup	76,80 tahun	72,49 tahun (data BPS Th 2016)	-
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan bagi semua masyarakat				
		Angka rata-rata lama sekolah	11,87	10.88	91.66
4	Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar kepada korban bencana				
		Respone time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana	3 jam	3 jam	100%

NO		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
5	peningkatan kinerja pengelolaan persampahan				
	1	Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu	100%	86.91%	86.91%
6	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam melakukan pengelolaan sampah				
	1	Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber	15%	13.09%	87.27%
7	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja				
	1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	85% dari seluruh pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan	85,02%	100,02%
8	Meningkatnya Kurikulum Pelatihan Keterampilan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja				
		Persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan	80% dari jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan	79,67%	99.59%
9	tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya				
	1	terlaksananya pengerukan sungai	30,486 m	15,049.08 m	49.36%
	2	panjang pengaman pantai yang terbangun	1,099 m	491.14 m	44.69%
10	Tersedianya jaringan jalan dan trotoar dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota				
	1	persentase kondisi jalan dalam kondisi baik pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder	98,00%	95,88%	97,84%
	2	panjang trotoar yang terbangun pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder	12.180 m	24.460m	200,82%
11	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang				
	1	jumlah penumpang Bus Transportasi Jakarta per Hari	506.000 pnp/hari	385.185 pnp/hari	76,12%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
12	meningkatnya Ruang bagi sektor informal pada Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Permukiman			
1	Persentase peningkatan luas ruang PKL (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara	20%	1.46%	7.28%
13	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan			
1	Jumlah aspirasi warga jakarta yang direspon dari berbagai saluran media	75%	89%	118.67%
14	berkurangnya tingkat risiko/efek negatif akibat kebakaran			
1	tingkat waktu tanggap kebakaran (respone time) 15 menit	82%	94%	114.63%
15	Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi			
1	jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online	10.237 wajib pajak	10.237 wp	100%
16	meningkatnya intensitas dan inovasi promosi pariwisata			
1	jumlah kunjungan wisata mancanegara	2.485.864 orang	2.658.055 orang	106.92%
2	jumlah kunjungan wisata nusantara	31.435.592 orang	35.464.572 orang	112.81%
17	Meningkatya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat			
1	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	99%	99%	100%
18	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi			
1	Jumlah SDM Aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)	2.000 CPNS	1.051 CPNS	52,55%
19	Meningkatnya Investasi Daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung Perekonomian Daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip Good Governance			
1	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	55 triliun	108.6 triliun	197.45%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
20	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota			
1	Skala Indeks Demokrasi	85 poin	70.85 poin	83,35%

Berikut Data Proyeksi Ekonomi Makro dan Sosial Tahun 2017

No	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017	REALISASI
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,03% - 6,43%	6.29%
2	Tingkat Inflasi	4% - 5%	3.72% (data Tw IV)
3	PDRB harga Berlaku	2.452,86 miliar rupiah	618,236.75 miliar rupiah
4	PDRB harga Konstan Tahun 2010	1.635,24 miliar rupiah	415,001.8 miliar rupiah
5	Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha		
	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,09%	0.09%
	B. Pertambangan dan Penggalian	0,18%	0.24%
	C. Industri Pengolahan	12,49%	13.24%
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,24%	0.34%
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04%	0.03%
	F. Konstruksi	12,58%	12.88%
	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	15,78%	17.00%
	H. Transportasi dan Pergudangan	3,45%	3.52%
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98%	4.78%
	J. Informasi dan Komunikasi	10,61%	7.52%
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,09%	10.31%
	L. Real Estate	6,56%	6.16%
	M. Jasa Perusahaan	7,61%	7.63%
	N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,95%	5.22%
	O. Jasa Pendidikan	4,95%	5.58%
	P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67%	1.66%
	Q. Jasa Lainnya	3,73%	3.80%
6	Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran		
	A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,11%	58.34%
	B. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,86%	1.94%
	C. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,45%	11.56%
	D. Pembentukan Modal Tetap Bruto	43,25%	39.21%
	E. Perubahan Inventori	0,84%	2.68%
	F. Ekspor Barang dan Jasa	13,70%	14.75%
	G. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	44,31%	42.40%
	H. Net Ekspor Antar Daerah	15,10%	13.92%

No	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017	REALISASI
7	PDRB per Kapita	236,44 juta rupiah	Harga berlaku: 207,99 juta rupiah (th 2016), Harga konstan: 147,06
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	14,36%	59.06%
9	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB	16,91%	69.89%
10	Rasio Dana Perimbangan terhadap PDRB	7,65%	30.68%
11	APBD	Rp. 70.191.958.203.554	62.629.608.326.245,40
12	ICOR	8,87	10.12%
13	Kemampuan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	13,97 triliun	Rp. 6,261,993,464,820
14	Peranan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Investasi Total	1,45%	-
15	Ekspor		
	A. Melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta	46.390.850.590 USD	4,137.46 juta USD
	B. Produk asal DKI Jakarta	11.538.106.633 USD	721.95 Juta USD
16	Impor melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta	71.132.687.000 USD	75,365.61 juta USD
17	Jumlah Wisman	3.200.000	2,658,055 (data Disparbud Th 2017)
18	Jumlah Penduduk	10.374.235	10,348,828
19	Kepadatan Penduduk	15.682,42	15.624
20	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,1%	2.2%
21	Jumlah Angkatan Kerja	5.461.870 orang	4,856.12 orang
22	Jumlah Penduduk Bekerja	5.169.170 orang	4,509.17 orang
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,3%	7.14%
24	Jumlah Penduduk Miskin	389,69 ribu orang	393.13 ribu orang
25	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	3,77%	3.78%
26	Indeks Pembangunan Manusia	79,60%	79.60 (Th 2016)
27	Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK		
	- SD/MI	113,40%	105.00%
	- SMP/MTs	115,50%	108.51%
	- SMA/MA/SMK	97,00%	92.36%

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dasar perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 secara garis besar adalah untuk menginformasikan mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2017. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
2. **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
3. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**
4. **Keputusan Gubernur Nomor 1900 Tahun 2017 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017**
5. **Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada dokumen Keputusan Gubernur Nomor 1900 Tahun 2017 tentang Perjanjian Kinerja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017. Adapun Keputusan Gubernur tersebut merupakan revisi terhadap Keputusan Gubernur Nomor 1670 Tahun 2013 tentang Penetapan Kinerja Tahun 2013-2017 dan Peraturan Daerah Nomor

2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017.

B. MANFAAT DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2017 dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017;
b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017; dan
c. Hasil evaluasi nantinya akan dijadikan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

1. Kedudukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kedudukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kondisi Pemerintahan

Dengan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan upaya Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Reformasi Birokrasi. Penataan ulang organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel I.1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No	Perangkat Daerah	
1	Sekretariat Daerah	1
2	Sekretariat DPRD	1
3	Inspektorat	1
4	Badan	10
5	Dinas	23
6	Kota Administrasi	5
7	Kabupaten Administrasi	1
Total		42

Sumber Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah serta kekhususannya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Satpol PP.

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dengan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
b. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
d. pembinaan administrasi dan aparatur Daerah;
e. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretariat Daerah;
f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
g. pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan Perangkat Daerah;
h. penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama Daerah, dan protokol;
i. fasilitasi dan pengoordinasian fungsi perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial serta mental spiritual;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dibawah Sekretaris Daerah terdapat 4 (empat) orang Asisten yang mempunyai tugas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup serta Kesejahteraan Rakyat.

2. Sekretariat DPRD

Merupakan unsur pelayanan kepada DPRD, yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan

secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. Inspektorat

merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah.

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. .

4. Dinas

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah, Dinas sebagaimana dimaksud dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskana kepada Daerah, meliputi :

a. Urusan Pemerintahan Wajib; dan

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

5. Badan

Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Badan dibentuk untuk melaksanakan tugas Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, meliputi :

a. Perencanaan;

b. Keuangan;

c. Kepegawaian;

d. Pendidikan dan Pelatihan;

e. Penelitian dan Pengembangan; dan

f. Fungsi penunjang urusan pemerintahan lainnya.

6. Kota/Kabupaten Administrasi

Kota/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Walikota/Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, kota/kabupaten administrasi dibentuk untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, membina 44 (empat puluh empat) kecamatan dan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

E. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 4 Asisten, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 23 Dinas, 10 Badan, 5 Kota Administrasi, 1 Kabupaten Administrasi.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka susunan Kelembagaan tersebut efektif dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2017 hingga sampai saat ini.

Gambar I.1
Pola Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

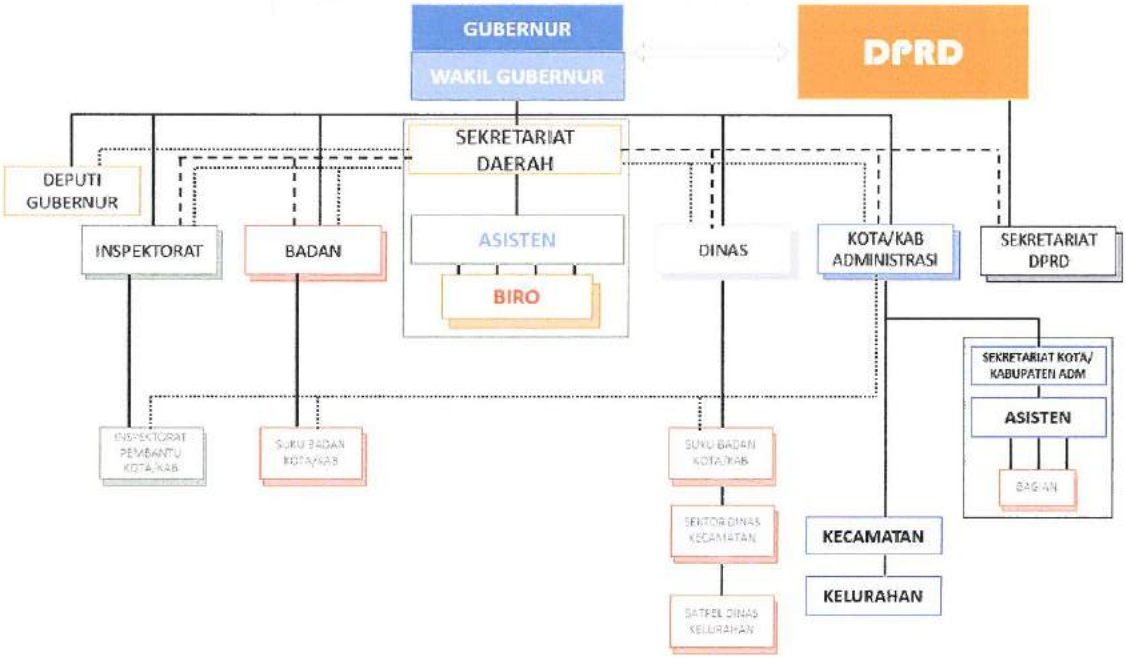

F. PERSONIL/PEGAWAI

dalam menunjang Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak **69.540** pegawai per 31 Desember 2017.

Grafik I.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber BKD Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia

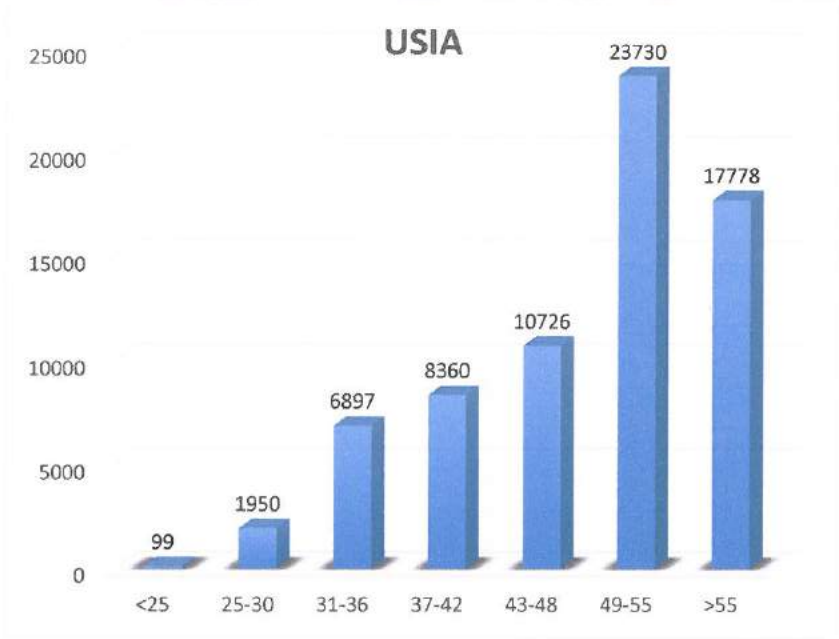

Sumber BKD Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017

Grafik I.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

Sumber BKD Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017

Grafik I.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Penempatan

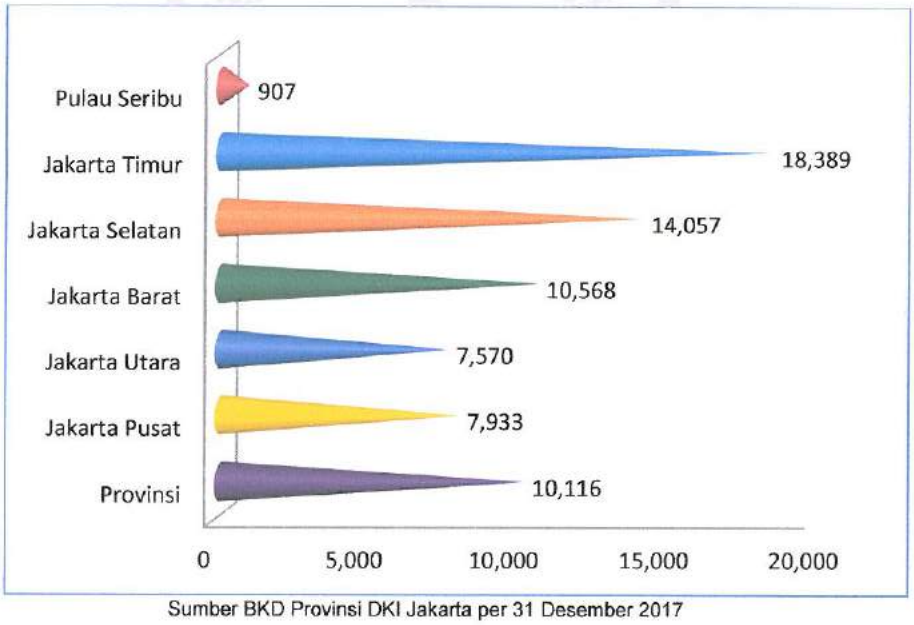

Sumber BKD Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017

G. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2015 tentang **Reformasi Birokrasi** bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah; meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah/unit perangkat daerah, dengan 3 (tiga) sasaran utama dilakukannya reformasi birokrasi dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan ke-3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi seperti yang telah disebutkan di atas perlu dipelihara capaian-capaian program/kegiatan yang dianggap baik dan ditingkatkan atau dikembangkan. Sedangkan program/kegiatan yang belum memberikan hasil yang optimal, khususnya program yang langsung menyentuh masyarakat perlu dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.

1. Capaian Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2017 untuk mewujudkan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel.

   Pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2017 untuk mewujudkan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel yaitu pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang terdiri dari kegiatan peningkatan pemahaman aparatur terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2017 ini dilaksanakan pada 21 Maret 2017 dengan peserta 15 SKPD dan 37 UKPD, pembinaan unit kerja yang telah tetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 316 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2017 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, RSKD Duren Sawit, RSUD Koja RSUD Tarakan RSUD Cengkareng dan RSUD Pasar Rebo. Pembinaan terhadap 7 unit kerja tersebut diantara dengan melakukan kunjungan kerja (studi banding) ke Pusat Konservasi Tumbuhan LIPI (PKT LIPI) Kebun Raya Bogor dan penilaian yang dilakukan oleh Tim

Penilai Internal terhadap 7 unit tersebut menetapkan RSKD Duren Sawit sebagai peringkat terbaik pertama, Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebagai peringkat terbaik kedua dan RSUD Tarakan sebagai peringkat terbaik ketiga sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 19 tahun 2018 tentang Penetapan hasil evaluasi pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Indikator keberhasilan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel menurut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019 adalah Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP). Tahun 2017 nilai SAKIP DKI adalah "**B**" dengan nilai **60,13**.

2. Capaian Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2017 untuk mewujudkan sasaran birokrasi efektif dan efisien

   Pada area perubahan bidang sumber daya manusia aparatur diantaranya penetapan analisa jabatan dan analisa beban kerja perangkat daerah sebanyak 42 dalam peraturan gubernur. Sedangkan area perubahan bidang tatalaksana diantaranya telah dilakukan pendampingan penyusunan standar pelayanan pada kelurahan, kecamatan dan unit pelaksana teknis, serta pendampingan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada unit perangkat daerah.

   Untuk mewujudkan birokrasi efektif dan efisien pada area perubahan bidang kelembagaan adalah dilakukannya monitoring evaluasi kelembagaan pada 42 perangkat daerah beserta unit perangkat daerahnya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah.

   Indikator keberhasilan sasaran birokrasi birokrasi efektif dan efisien menurut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019 adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Profesionalisme ASN. Tahun 2017 nilai IRB DKI adalah "**B**" dengan nilai **63,75** dan Indeks Profesionalisme ASN 89.

3. Capaian Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2017 untuk mewujudkan sasaran birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Sedangkan untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas pada area perubahan bidang pelayanan yaitu terbentuk mal pelayanan publik melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Mal Pelayanan Publik dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah serta terintegrasi berbagai layanan baik instansi Pusat dan Daerah.

Indikator keberhasilan sasaran birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas menurut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019 adalah Persentase Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Undang Undang Pelayanan Publik . Tahun 2017 nilai kepatuhan DKI adalah **85,43** masuk dalam zona hijau (Kepatuhan Tinggi).

H. PERTUMBUH AN EKONOMI JAKARTA TAHUN 2017

1. Ekonomi

Berdasarkan dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Nomor 01/01/31/Th.XX tanggal 2 Januari 2018, bulan Desember 2017, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0,65 persen. Laju inflasi Tahun 2017 mencapai 3,72 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta 3,72 persen.

Grafik I.5
Perkembangan Inflasi DKI Jakarta, Desember 2016-Desember 2017

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Tujuh kelompok pengeluaran yang diteliti, tiga terbesar yang mengalami inflasi adalah kelompok bahan makanan 2,23 persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,70 persen serta kelompok kesehatan 0,45 persen.

Tabel I.2
Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2017, Tahun 2017 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi Desember 2017	Laju Inflasi Tahun 2017	Laju Inflasi Tahun ke Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Umum	**0,65**	**3,72**	**3,72**
1. Bahan Makanan	2,23	2,32	2,32
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,29	5,06	5,06
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,30	3,54	3,54
4. Sandang	006	4,98	4,98
5. Kesehatan	0,45	3,28	3,28
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	-0,11	0,66	0,66
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,70	4,69	4,69

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan 461 komoditi yang didata yang memberikan sumbangan inflasi diatas 0,05 persen diantaranya komoditi angkutan udara (0,1250 persen), bahan bakar rumah tangga (0,0576 persen), cabai merah (0,0 567 persen), daging ayam ras (0,0550 persen) dan telur ayam ras (0,0546 persen).

Pada bulan Desember 2017, dari 82 kota yang diteliti seluruh kota mengalami inflasi. Kota yang mengalami inflasi terendah adalah Kota Sorong 0,18 persen. Kota Jakarta menempati urutan 45 dari seluruh kota yang mengalami inflasi.

Jika dibandingkan dengan inflasi daerah satelit yang berada di sekitar DKI Jakarta, Kota Tangerang (0,80 persen), Kota Depok (0,61 persen), Kota Bogor (0,43 persen) dan Kota Bekasi (0,42 persen).

Tabel I.3
Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi, Desember 2017 untuk 82 Kota

No	Kota	Peringkat	IHK Desember 2017	Inflasi Desember 2017	No	Kota	Peringkat	IHK Desember 2017	Inflasi Desember 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)		(1)	(2)	(3)	(4)
1	MEULABOH	13	131.82	1.18	42	KEDIRI	71	126.77	0.43
2	BANDA ACEH	19	125.77	1.06	43	MALANG	63	131.09	0.49
3	LHOKSEUMAWE	3	128.53	1.69	44	PROBOLINGGO	40	127.00	0.69
4	SIBOLGA	74	136.59	0.38	45	MADIUN	66	128.61	0.47
5	PEMATANG SIANTAR	67	136.16	0.46	46	SURABAYA	26	131.26	0.85
6	MEDAN	32	137.16	0.73	47	TANGERANG	28	138.29	0.80
7	PADANGSIDIMPUAN	23	130.15	0.87	48	CILEGON	68	137.85	0.46
8	PADANG	36	136.30	0.72	49	SERANG	73	139.90	0.42
9	BUKITTINGGI	76	128.02	0.37	50	SINGARAJA	14	139.66	1.12
10	TEMBILAHAN	60	135.43	0.50	51	DENPASAR	18	127.17	1.07
11	PEKANBARU	64	133.16	0.48	52	MATARAM	39	128.75	0.70
12	DUMAI	67	133.82	0.53	53	BIMA	9	134.38	1.38
13	BUNGO	78	129.64	0.32	54	MAUMERE	75	123.93	0.38
14	JAMBI	6	130.62	1.52	55	KUPANG	10	131.71	1.35
15	PALEMBANG	47	128.52	0.62	56	PONTIANAK	61	140.00	0.50
16	LUBUKLINGGAU	33	128.69	0.73	57	SINGKAWANG	25	132.11	0.86
17	BENGKULU	38	139.84	0.70	58	SAMPIT	49	131.17	0.61
18	BANDAR LAMPUNG	65	131.31	0.47	59	PALANGKARAYA	43	127.19	0.67
19	METRO	81	137.19	0.23	60	TANJUNG	4	130.53	1.58
20	TANJUNG PANDAN	7	139.56	1.50	61	BANJARMASIN	30	131.11	0.75
21	PANGKAL PINANG	11	136.95	1.33	62	BALIKPAPAN	8	134.81	1.41
22	BATAM	37	132.20	0.72	63	SAMARINDA	35	133.58	0.73
23	TANJUNG PINANG	27	130.26	0.84	64	TARAKAN	24	140.38	0.87
24	**DKI JAKARTA**	**45**	**130.97**	**0.65**	65	MANADO	59	128.71	0.51
25	BOGOR	69	131.86	0.43	66	PALU	2	132.59	1.87
26	SUKABUMI	54	130.22	0.58	67	BULUKUMBA	79	136.31	0.30
27	BANDUNG	34	129.61	0.73	68	WATAMPONE	46	126.93	0.63
28	CIREBON	56	126.44	0.56	69	MAKASSAR	17	132.10	1.09
29	BEKASI	72	126.77	0.42	70	PARE-PARE	15	126.28	1.11
30	DEPOK	48	129.24	0.61	71	PALOPO	21	128.67	0.93
31	TASIKMALAYA	58	129.26	0.51	72	KENDARI	42	125.28	0.68
32	CILACAP	50	133.45	0.60	73	BAU-BAU	31	132.74	0.74
33	PURWOKERTO	55	128.05	0.57	74	GORONTALO	29	127.07	0.79
34	KUDUS	51	136.67	0.60	75	MAMUJU	53	130.28	0.59
35	SURAKARTA	16	126.21	1.10	76	AMBON	77	125.79	0.34
36	SEMARANG	41	129.13	0.68	77	TUAL	5	153.31	1.54
37	TEGAL	62	127.43	0.49	78	TERNATE	12	132.84	1.29
38	YOGYAKARTA	22	128.39	0.90	79	MANOKWARI	80	124.53	0.27
39	JEMBER	44	126.88	0.66	80	SORONG	82	128.53	0.18
40	BANYUWANGI	52	126.38	0.60	81	MERAUKE	20	133.77	0.97
41	SUMENEP	70	127.19	0.43	82	JAYAPURA	1	131.75	2.28

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

2. Ekspor dan Impor

a. Ekspor

Berdasarkan dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Nomor 07/02/31/Th. XX tanggal 1 Februari 2018 Nilai ekspor melalui Provinsi DKI Jakarta pada bulan Desember 2017 mencapai 4,137.46 juta dollar Amerika.

Tabel I.4
Ekspor melalui Provinsi DKI Jakarta bulan November 2017

Periode	Nilai (FOB Juta $)	% Perubahan terhadap	
		Bulan sebelumnya	Tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)
September 2017	4,480.07	-10.45	8.19
Oktober 2017	4,715.60	5.26	17.98
November 2017	4,963.83	5.26	20.07
*Desember 2017**	*4,137.46*	*-16.65*	*4.56*

* Angka Sementara

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Nilai ekspor produk-produk Provinsi DKI Jakarta bulan Desember 2017 mencapai 721,95 juta dollar Amerika.

Tabel I.5
Nilai Ekspor Produk Provinsi DKI Jakarta untuk beberapa periode

Periode	Nilai (FOB Juta $)	% Perubahan terhadap	
		Bulan sebelumnya	Tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)
September 2017	823.27	-10.86	-22.34
Oktober 2017	825.75	0.30	-21.78
November 2017	921.06	11.54	12.25
*Desember 2017**	*721.95*	*-21.62*	*1.00*

* Angka Sementara

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Kontribusi nilai ekspor produk-produk Provinsi DKI Jakarta terhadap nilai ekspor yang melalui Provinsi DKI Jakarta bulan Desember 2017 mencapai 17.45 persen, sedangkan pasar utama ekspor produk DKI Jakarta untuk bulan Desember 2017 adalah kawasan ASEAN yakni 46.69 persen.

b. Impor

Berdasarkan dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Nomor 07/02/31/Th. XX tanggal 1 Februari 2018 nilai Impor melalui DKI Jakarta bulan Desember 2017 atas dasar CIF (cost, insurance dan freight) mencapai 7,617.40 juta dollar Amerika, turun 4.76 persen dari nilai impor bulan sebelumnya di tahun 2017 yang mencapai 7,998.45 juta dolar Amerika dan lebih tinggi 15.84 persen dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2016.

Nilai impor melalui DKI Jakarta bulan Desember 2017 yang mencapai 7,617.40 juta dollar Amerika terdiri dari nilai impor melalui Kawasan Berikat 1,099.68 juta dollar Amerika dan di luar Kawasan Berikat 6.517.72 juta dollar Amerika, dengan kontribusi terhadap total impor masing-masing 14,44 persen dan 85,56 persen.

Tabel I.6
Nilai Impor melalui DKI Jakarta menurut Golongan Barang HS 2 Dijit, Desember 2017

	Golongan Barang	Nilai FOB (Juta US$)					Persentase (%)		
		Des-17 *	Nov-17	Des-16	Jan-Des 2017	Perubahan Des 2017 thd Nov 2017	Peran Des 2017 thd Total	Des 2017 thd Nov 2017	Des 2017 thd Des 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	1,378.80	1,500.92	1,189.54	14,540.03	-122.12	18.10	-8.14	15.91
2	Mesin / Peralatan Listrik	1,346.83	1,236.55	1,046.87	12,744.79	110.28	17.68	8.92	28.65
3	Kendaraan dan Bagiannya	500.32	532.70	346.37	4,705.10	-32.38	6.57	-6.08	44.45
4	Plastik dan Barang dari Plastik	460.24	591.19	387.37	6,006.78	-130.95	6.04	-22.15	18.81
5	Besi dan Baja	418.47	456.33	349.83	4,917.25	-37.86	5.49	-8.30	19.62
6	Perangkat Optik	245.78	281.87	197.55	2,155.43	-36.09	3.23	-12.80	24.41
7	Bahan Kimia Organik	187.36	219.22	169.75	2,254.21	-31.86	2.46	-14.53	10.37
8	Karet dan Barang dari Karet	166.42	107.11	112.89	1,894.24	59.31	2.18	55.37	47.42
9	Benda-benda dari Besi dan Baja	129.41	139.92	118.25	1,460.24	-10.51	1.70	-7.51	9.44
10	Tembaga	127.57	136.15	81.32	590.80	-8.58	1.67	-6.30	56.87
	Total 10 Komoditi	4,961.18	5,201.96	3,999.74	51,268.88	-240.78	65.13	-4.63	24.04
	Lainnya	2,656.22	2,796.49	2,576.15	24,096.73	-140.27	34.87	-5.02	3.11
	Total Impor Melalui DKI Jakarta	7,617.40	7,998.45	6,575.89	75,365.61	-381.04	100.00	-4.76	15.84

*Angka Sementara

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Pada bulan Desember 2017, hampir seluruh golongan barang utama (HS 2 Digit) impor melalui DKI Jakarta mengalami penurunan dibandingkan

bulan sebelumnya. Penurunan masing-masing golongan barang yaitu plastik dan barang dari plastik 130,95 juta dollar Amerika; mesin-mesin/pesawat mekanik 122,12 juta dollar Amerika; besi dan baja 37,86 juta dollar Amerika; perangkat optik 36,09 juta dollar Amerika; kendaraan dan bagiannya 32,38 juta dollar Amerika; bahan kimia organik 31,86 juta dollar Amerika; benda-benda dari besi dan baja 10,51 juta dollar Amerika; dan tembaga 8,58 juta dollar Amerika. Sedangkan komoditi unggulan yang mengalami kenaikan nilai impor adalah mesin/peralatan listrik Tembaga 110,28 juta dolar Amerika; dan karet dan barang dari karet 59,31 juta dollar Amerika.

3. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk DKI Jakarta

Berdasarkan dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/01/31/Th. XX tanggal 2 Januari 2018, pada September 2017, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi DKI Jakarta yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,409. Angka ini turun sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,413. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,397, Gini Ratio September 2017 mengalami kenaikan 0,012 poin.

Grafik I.6
Perkembangan Gini Ratio, September 2016 – September 2017

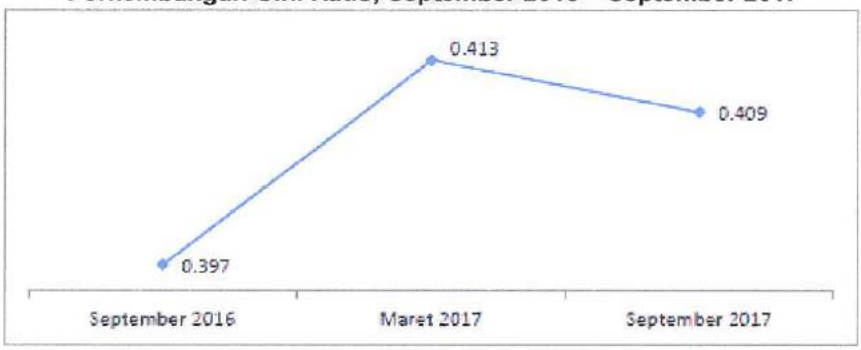

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

4. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Nomor 04/01/31/Th.XX tanggal 2 Januari 2017, Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2017 mencapai 3,78 persen yang berarti mencakup sejumlah 393,13 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2017 (3,77% atau 389,69 ribu orang), persentase penduduk miskin meningkat 0,01 poin atau meningkat sebesar 3,44 ribu orang. Sedangkan dibandingkan dengan September 2016 (3,75% atau 385,84 ribu orang), persentase penduduk miskin meningkat 0,03 poin atau meningkat sebesar 7,29 ribu orang.

Tabel I.7
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
September 2016 – Maret 2017 – September 2017

Bulan	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
September 2016	334.938 (64,33%)	185.752 (35,67%)	520.690 (100%)	385,84	3,75
Maret 2017	347.383 (64,74%)	189.163 (35,26%)	536.546 (100%)	389,69	3,77
September 2017	383.192 (66,27)	195.054 (33,73)	578.247 (100%)	393,13	3,78

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Keadaan kemiskinan penduduk pada bulan September 2017 dibandingkan dengan keadaan Maret 2017 dan September 2016:

a. Angka kemiskinan (P_0) naik 0,01 poin pada Maret 2017 – September 2017 dan naik 0,03 poin pada September 2016 – September 2017.
b. Rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami

peningkatan sebesar 0,124 poin (0,488 pada Maret 2017 menjadi 0,612 pada September 2017) dan meningkat 0,179 poin (0,433 pada September 2016 menjadi 0,612 pada September 2017).

c. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin atau Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) meningkat sebesar 0,052 poin dari 0,097 menjadi 0,149 selama kurun Maret 2017 – September 2017 dan meningkat sebesar 0,074 poin dari 0,075 menjadi 0,149 selama kurun September 2016 - September 2017.

Tabel I.8
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kemiskinan (P2) di Provinsi DKI Jakarta, Maret 2013-September 2017

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

I. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran singkat tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi, Personil Perangkat Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan Antara target dan realisasi kinerja tahun 2017. Perbandingan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016 dengan target 2017 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2013 sampai tahun 2017. Untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan standar nasional. Analisis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan upaya/langkah dan di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan Antara target dan realisasi kinerja tahun 2017. Perbandingan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016 dengan target 2017 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2013 sampai tahun 2017. Untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan standar nasional. Analisis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan janji rencana kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian Antara SKPD/UKPD dengan Kepala Pemerintah yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dimana perjanjian Kinerja tersebut akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam tahun anggaran 2017.

Perjanjian Kinerja itu sendiri bertujuan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 adalah merupakan sasaran dan target kinerja yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1900 Tahun 2017 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017, Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Pada tahun 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Sasaran Strategis akan dijadikan tolok ukur dalam ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi Gubernur pada tahun 2017.

1. Pernyataan Visi

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2017 sebagai berikut :

"Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik".

Visi pembangunan jangka menengah diatas dapat dijelaskan bahwa Kota Jakarta adalah :

a. Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
b. Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman dan berkelanjutan.
c. Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.
d. Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta kosisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Menjadikan jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah, menahun seperti macet, banjir, permukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
c. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota;
d. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;
e. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

3. Tujuan Strategis

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan sesuai masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1

Mewujudkan jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan pembangunan sesuai misi 1 adalah :

a. Mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai denga potensi dan ciri khasnya didukung sarana dan prasarana yang memadai;
b. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan;

Misi 2

Menjadikan jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain. Tujuan pembangunan sesuai misi 2 adalah :

a. Menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun;
b. Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi risiko bencana.

Misi 3

Menjadikan ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota. Tujuan pembangunan sesuai misi 3 adalah :

- Menyediakan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Misi 4

Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota, tujuan pembangunan sesuai misi 4 adalah :

a. Mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal.
b. Menjadikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota.

Misi 5

Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Tujuan pembangunan sesuai misi 5 adalah :

a. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan;
b. Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat;
c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk alami.

4. **Sasaran strategis**

Sasaran pembangunan sesuai masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1

Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Salah satu tujuan dari misi ini adalah mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khasnya didukung sarana dan prasarana yang memadai. Sasaran pembangunan sesuai dengan tujuan di misi ini adalah:

a. Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW;
b. Berkembangnya kawasan-kawasan TOD (*transit oriented development*) yang memadukan berbagai fungsi dan sarana kota dengan mudah;
c. Tersedianya ruang untuk pedagang informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota;
d. Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal;
e. Tersedianya stok dan distribusi pangan untuk mendukung aktivitas ekonomi kota;
f. Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang publik;dan
g. Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota.

Tujuan lain dari misi 1 ini adalah Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan sesuai dengan tujuan di misi ini adalah:

a. Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan; dan
b. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten

Misi 2

Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain. Salah satu tujuan pembangunan sesuai misi 2 adalah Menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun, dan sasaran yang sesuai untuk tujuan ini adalah:

a. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang;
b. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota;
c. Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya;
d. Tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara optimal;
e. Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani semua wilayah kota; dan
f. Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman.

Tujuan lain dari misi 2 adalah Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Untuk mencapainya telah ditetapkan sasaran sebagai berikut:

a. Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta; dan
b. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Misi 3

Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota, mempunyai hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. untuk mencapainya telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat;
b. Tertatanya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan kampung);dan
c. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta

Misi 4

Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. Tujuan pembangunan sesuai misi 4 adalah mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal. Untuk mencapainya telah ditetapkan sasaran sebagai berikut:

a. Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas;

b. Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta;
c. Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota;
d. Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kota.

Tujuan lain yaitu menjadikan masyarakat DKI Jakarta yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota. Untuk mencapainya telah ditetapkan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat kota terutama kaum marginal dan rentan;
b. Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan;
c. Meningkatnya peran olahraga dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat;
d. Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA);dan
e. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota.

Misi 5

Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Tujuan pembangunan antara lain mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan. Untuk mencapainya telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih;
b. Meningkatnya ketersediaan SDM Pemprov yang sesuai dengan kompetensinya;dan
c. Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif.

Tujuan yang lain yaitu meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapainya telah ditetapkan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat (Pelayanan publik yang prima pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu);
c. Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. Untuk mencapainya telah ditetapkan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat;dan

b. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.

Tujuan selanjutnya yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk alami. Untuk mencapainya telah ditetapkan sasaran sebagai berikut:

a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk;dan

b. Meningkatnya jumlah pasangan Usia subur yang mendapatkan pelayanan KB.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagai berikut :

B. PERJANJIAN KINERJA

1. Indikator Ekonomi Makro dan Sosial

Tabel II.1
Indikator Ekonomi Makro dan Sosial

No	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,03% - 6,43%
2	Tingkat Inflasi	4% - 5%
3	PDRB harga Berlaku	2.452,86 miliar rupiah
4	PDRB harga Konstan Tahun 2010	1.635,24 miliar rupiah
5	Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	
	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,09%
	B. Pertambangan dan Penggalian	0,18%
	C. Industri Pengolahan	12,49%
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,24%
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04%
	F. Konstruksi	12,58%
	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	15,78%
	H. Transportasi dan Pergudangan	3,45%
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98%
	J. Informasi dan Komunikasi	10,61%
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,09%
	L. Real Estate	6,56%
	M. Jasa Perusahaan	7,61%

No	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017
	N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,95%
	O. Jasa Pendidikan	4,95%
	P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67%
	Q. Jasa Lainnya	3,73%
6	Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran	
	A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,11%
	B. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,86%
	C. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,45%
	D. Pembentukan Modal Tetap Bruto	43,25%
	E. Perubahan Inventori	0,84%
	F. Ekspor Barang dan Jasa	13,70%
	G. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	44,31%
	H. Net Ekspor Antar Daerah	15,10%
7	PDRB per Kapita	236,44 juta rupiah
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	14,36%
9	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB	16,91%
10	Rasio Dana Perimbangan terhadap PDRB	7,65%
11	APBD	Rp. 70.191.958.203.554
12	ICOR	8,87
13	Kemampuan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	13,97 triliun
14	Peranan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Investasi Total	1,45%
15	Ekspor	
	A. Melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta	46.390.850.590 USD
	B. Produk asal DKI Jakarta	11.538.106.633 USD
16	Impor melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta	71.132.687.000 USD
17	Jumlah Wisman	3.200.000
18	Jumlah Penduduk	10.374.235
19	Kepadatan Penduduk	15.682,42
20	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,1%
21	Jumlah Angkatan Kerja	5.461.870 orang
22	Jumlah Penduduk Bekerja	5.169.170 orang
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,3%
24	Jumlah Penduduk Miskin	389,69 ribu orang
25	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	3,77%
26	Indeks Pembangunan Manusia	79,60%
27	Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	
	- SD/MI	113,40%
	- SMP/MTs	115,50%
	- SMA/MA/SMK	97,00%

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1	Mendorong Peningkatan Predikat LKIP	Indeks	BB
1.2	Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks	WTP

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Akses dan Kualitas kesehatan masyarakat

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1	Angka kematian ibu	Per kelahiran	30 orang per 100.000 kelahiran hidup
2.2	Angka kematian bayi	Per Kelahiran	7,10 bayi per 100.000 kelahiran hidup
2.3	Angka Usia Harapan Hidup	Per tahun	76,80 tahun

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan bagi semua masyarakat

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.1	Angka rata-rata lama sekolah	-	11,87

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar kepada korban bencana

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.1	Respone time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana		3 jam

Sasaran Strategis 5

peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.1	Persentase sampah dalam kota yang dapat ditangani secara tepat waktu	%	100%
5.2	Persentase pengurangan timbunan sampah di sumber	%	15%

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	85% dari seluruh pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Kurikulum Pelatihan Keterampilan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7.1	Persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan	-	80% dari jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan

Sasaran Strategis 8

tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
8.1	terlaksananya pengerukan sungai	-	30.486 m
8.2	panjang pengaman pantai yang terbangun	-	1.099 m

Sasaran Strategis 9

Tersedianya jaringan jalan dan trotoar dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
9.1	persentase kondisi jalan dalam kondisi baik pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder	%	98,00 %
9.2	panjang trotoar yang terbangun pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder	meter	12.180 m

Sasaran Strategis 10

Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10.1	jumlah penumpang Bus Transportasi Jakarta per Hari	Per hari	506.000 pnp/hari

Sasaran Strategis 11

meningkatnya Ruang bagi sektor informal pada Kawasan Perkanloran, Perdagangan dan Permukiman

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
11.1	Persentase peningkatan luas ruang PKL (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara	%	20%

Sasaran Strategis 12

Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
12.1	Jumlah aspirasi warga jakarta yang direspon dari berbagai saluran media	%	75%

Sasaran Strategis 13

berkurangnya tingkat risiko/efek negatif akibat kebakaran

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
13.1	tingkat waktu tanggap kebakaran (respone time) 15 menit	%	82%

Sasaran Strategis 14

Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
14.1	jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online	-	10.237 wajib pajak

Sasaran Strategis 15

meningkatnya intensitas dan inovasi promosi pariwisata

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
15.1	jumlah kunjungan wisata mancanegara	-	2.485.864 orang
15.2	jumlah kunjungan wisata nusantara	-	31.435.592 orang

Sasaran Strategis 16

Meningkatya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
16.1	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	%	99%

Sasaran Strategis 17

Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
17.1	Jumlah SDM Aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)	-	2.000 CPNS

Sasaran Strategis 18

Meningkatnya Investasi Daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung Perekonomian Daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip Good Governance

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
18.1	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	-	55 triliun

Sasaran Strategis 19

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
19.1	Skala Indeks Demokrasi	Indeks	85 poin

Jumlah APBD Tahun Anggaran 2017 : Rp. 70.191.958.203.554,-

Jumlah Anggaran Belanja TA 2017 : Rp. 63.612.303.305.596,-

Jumlah Anggaran Belanja Langsung TA 2017 : Rp. 35.556.556.457.667,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengukur hasil capaian kinerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 yaitu dengan cara membandingkan Antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

Tabel III.1
Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta

NO		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				
	1	Mendorong Peningkatan Predikat LKIP	BB	B	75%
	2	Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP (2016)	Proses Pemeriksa-an LKPD oleh BPK
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas kesehatan masyarakat				
	1	Angka kematian ibu	30 orang per 100.000 kelahiran hidup	45.03 orang per 100.000 kelahiran hidup	N/A
	2	Angka kematian bayi	7,10 bayi per 1000 kelahiran hidup	2,53 bayi per 1000 kelahiran hidup	N/A
	3	Angka Usia Harapan Hidup	76,80 tahun	72,49 tahun (data BPS Th 2016)	-
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan bagi semua masyarakat				
		Angka rata-rata lama sekolah	11,87	10.88	91.66
4	Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar kepada korban bencana				
		Respone time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana	3 jam	3 jam	100%
5	peningkatan kinerja pengelolaan persampahan				
	1	Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu	100%	86.91%	86.91%
6	peningkatan kinerja pengelolaan persampahan				
	1	Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber	15%	13.09%	87.27%
7	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja				
	1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	85% dari seluruh pencari kerja yang	85,02%	100,02%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		terdaftar dapat ditempatkan		
8	Meningkatnya Kurikulum Pelatihan Keterampilan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja			
	Persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan	80% dari jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan	79,67%	99.59%
9	tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya			
	1 terlaksananya pengerukan sungai	30,486 m	15,049.08 m	49.36%
	2 panjang pengaman pantai yang terbangun	1,099 m	491.14 m	44.69%
10	Tersedianya jaringan jalan dan trotoar dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota			
	1 persentase kondisi jalan dalam kondisi baik pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder	98,00%	95,88%	97,84%
	2 panjang trotoar yang terbangun pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder	12.180 m	24.460m	200,82%
11	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang			
	1 jumlah penumpang Bus Transportasi Jakarta per Hari	506.000 pnp/hari	385.185 pnp/hari	76,12%
12	meningkatnya Ruang bagi sektor informal pada Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Permukiman			
	1 Persentase peningkatan luas ruang PKL (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara	20%	1.46%	7.28%
13	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan			
	1 Jumlah aspirasi warga jakarta yang direspon dari berbagai saluran media	75%	89%	118.67%
14	berkurangnya tingkat risiko/efek negatif akibat kebakaran			
	1 tingkat waktu tanggap kebakaran (respone time) 15 menit	82%	94%	114.63%
15	Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi			
	1 jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online	10.237 wajib pajak	10.237 wp	100%
16	meningkatnya intensitas dan inovasi promosi pariwisata			
	1 jumlah kunjungan wisata mancanegara	2.485.864 orang	2.658.055 orang	106.92%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	2 jumlah kunjungan wisata nusantara	31.435.592 orang	35.464.572 orang	112.81%
17	Meningkatya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat			
	1 Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	99%	99%	100%
18	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi			
	1 Jumlah SDM Aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)	2.000 CPNS	1.051 CPNS	52,55%
19	Meningkatnya Investasi Daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung Perekonomian Daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip Good Governance			
	1 Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	55 triliun	108.6 triliun	197.45%
20	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota			
	1 Skala Indeks Demokrasi	85 poin	70.85 poin	83,35%

Jumlah APBD Tahun Anggaran 2017 : Rp. 70.191.958.203.554,-

Tabel III.2
Data Proyeksi Ekonomi Makro dan Sosial Tahun 2017

No	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017	REALISASI
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,03% - 6,43%	6.29%
2	Tingkat Inflasi	4% - 5%	3.72% (data Tw IV)
3	PDRB harga Berlaku	2.452,86 miliar rupiah	618,236.75 miliar rupiah
4	PDRB harga Konstan Tahun 2010	1.635,24 miliar rupiah	415,001.8 miliar rupiah
5	Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha		
	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,09%	0.09%
	B. Pertambangan dan Penggalian	0,18%	0.24%
	C. Industri Pengolahan	12,49%	13.24%
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,24%	0.34%
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04%	0.03%
	F. Konstruksi	12,58%	12.88%
	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	15,78%	17.00%
	H. Transportasi dan Pergudangan	3,45%	3.52%
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98%	4.78%
	J. Informasi dan Komunikasi	10,61%	7.52%
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,09%	10.31%
	L. Real Estate	6,56%	6.16%
	M. Jasa Perusahaan	7,61%	7.63%

No	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017	REALISASI
	N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,95%	5.22%
	O. Jasa Pendidikan	4,95%	5.58%
	P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67%	1.66%
	Q. Jasa Lainnya	3,73%	3.80%
6	Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran		
	A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,11%	58.34%
	B. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,86%	1.94%
	C. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,45%	11.56%
	D. Pembentukan Modal Tetap Bruto	43,25%	39.21%
	E. Perubahan Inventori	0,84%	2.68%
	F. Ekspor Barang dan Jasa	13,70%	14.75%
	G. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	44,31%	42.40%
	H. Net Ekspor Antar Daerah	15,10%	13.92%
7	PDRB per Kapita	236,44 juta rupiah	Harga berlaku: 207,99 juta rupiah (th 2016), Harga konstan: 147,06
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	14,36%	59.06%
9	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB	16,91%	69.89%
10	Rasio Dana Perimbangan terhadap PDRB	7,65%	30.68%
11	APBD	Rp. 70.191.958.203.554	62.629.608.326.245,40
12	ICOR	8,87	10.12%
13	Kemampuan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	13,97 triliun	Rp. 6,261,993,464,820
14	Peranan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Investasi Total	1,45%	-
15	Ekspor		
	A. Melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta	46.390.850.590 USD	4,137.46 juta USD
	B. Produk asal DKI Jakarta	11.538.106.633 USD	721.95 Juta USD
16	Impor melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta	71.132.687.000 USD	75,365.61 juta USD
17	Jumlah Wisman	3.200.000	2,658,055 (data Disparbud Th 2017)
18	Jumlah Penduduk	10.374.235	10,348,828
19	Kepadatan Penduduk	15.682,42	15.624
20	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,1%	2.2%
21	Jumlah Angkatan Kerja	5.461.870 orang	4,856.12 orang
22	Jumlah Penduduk Bekerja	5.169.170 orang	4,509.17 orang
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,3%	7.14%
24	Jumlah Penduduk Miskin	389,69 ribu orang	393.13 ribu orang
25	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	3,77%	3.78%
26	Indeks Pembangunan Manusia	79,60%	79.60 (Th 2016)
27	Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK		
	- SD/MI	113,40%	105.00%

No	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017	REALISASI
	- SMP/MTs	115,50%	108.51%
	- SMA/MA/SMK	97,00%	92.36%

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dapat digunakan sebagai informasi yang transparan mengenai sebab tercapai maupun tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam maupun IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun narasi pada masing-masing sasaran strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mengukur peningkatan akuntabilias kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan indikator sebagai berikut :

- Peningkatan Predikat LKIP; dan
- Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

a. Mendorong Peningkatan Predikat LKIP dengan target penilaian "B"

Akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan

yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mengukur peningkatan akuntabilias kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan indikator Mendorong Peningkatan Predikat LAKIP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didapatkan hasil evaluasi yang menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 65,05 atau predikat B.

Hasil penilaian tersebut menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menunjukan hasil yang baik.

Tabel III.3
Rincian Penilaian dan Perbandingan SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2015	**2016**	**2017**
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,00	20,85	21,06
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,48	11,63	15,16
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,67	10,21	10,23
d.	Evaluasi Internal	10	3,59	6,06	6,31
e.	Capaian Kinerja	20	10,83	11,38	12,29
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**58,57**	**60,13**	**65,05**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**CC**	**B**	**B**

Dilihat dari tabel di atas, menggambarkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang semakin baik, dilihat dari perencanaan kinerja sampai dengan capaian kinerja menunjukkan adanya peningkatan nilai. Selain adanya peningkatan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat praktik dan hal-hal substanstif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya.

Evaluasi SAKIP SKPD dilaksanakan untuk melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pada tahun 2017 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan evaluasi pada 16 (enam belas) SKPD dan seluruh hasil evaluasi telah dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun ada peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terdapat beberapa kekurangannya, yaitu sebagai berikut :

1) Masih kurangnya komitmen dari jajaran Pemerintah DK! Jakarta untuk memperbaiki sistem manajemen berbasis kinerja di lingkungannya;
2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mulai menerapkan penjenjangan (cascading) kinerja mulai dari pimpinan sampai kepada tingkat eselon IV, namun belum sepenuhnya dimonitor;
3) Dievaluasi dan disimpulkan secara periodik dan dikaitkan dengan reward tertentu;
4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan secara formal dan berjenjang Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (core business) atau sasaran strategisnya, namun belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang berkembang, sehingga mempengaruhi kecukupan alat ukur yang menggambarkan keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kondisi yang seharusnya;
5) Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memprasyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Pengesahan anggaran lebih mengacu kepada kesesuaian nama program dan kegiatan, kode rekening,

serta pagu anggaran yang tersedia, kurang menekankan atau menagih hasil atau outcome yang mungkin belum selesai (tertunggak). Praktik seperti ini tidak mendorong SKPD untuk mengutamakan kinerja atau menerapkan anggaran berbasis kinerja;

6) Laporan Kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu dan telah direviu oleh APIP sesuai dengan Permenpan nomor 53/2014, namun belum membandingkan antara capaian tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya, dan tingkat keberhasilan terhadap tujuan dalam tahun terakhir RPJMD (tahun ke-5);
7) Evaluasi yang dilakukan atas program, baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Tahun 2018 merupakan awal tahun periode perencanaan jangka menengah yang telah dimulai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan segala upaya perbaikan dan inovasi dimulai dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan program, sistem pengawasan sampai dengan evaluasi, yang diharapkan akan dapat mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berbagai upaya atas kekurangan atau kelemahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

1) Bappeda akan memastikan RPJMD yang disusun telah menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan;
2) Seluruh pimpinan SKPD akan memastikan tersedianya rencana strategis yang selaras dengan RPJMD yang baru, dengan alat ukur (indikator) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian kinerja utama (Indikator Kinerja Utama) setiap SKPD yang dipimpinnya dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dan khas atau unik menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan SKPD tersebut, dan memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal;

3) Sekretaris Daerah dan Bappeda akan memastikan terus diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara meminta seluruh SKPD mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh SKPD dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya);
4) Sekretaris Daerah dan seluruh Pimpinan SKPD akan memastikan Perjanjian Kinerja atau kesepakatan kinerja yang telah ditandatangani dimonitor, diukur, ditagih, disimpulkan dan dijadikan dasar penerapan sistem penghargaan dan pengakuan (reward and recognition system) atas capaian kinerja yang pantas dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
5) Bappeda akan melakukan evaluasi program dalam rangka memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Bappeda harus memastikan keberhasilan maupun kekurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan di akhir periode RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
6) Inspektorat akan memastikan seluruh SKPD menerapkan sistem manajemen kinerja (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan cara meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh SKPD dan terus meningkatkan kapasitas APIP sebagai evaluator dan akan membangun sistem informasi penerapan SAKIP.

b. Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target penilaian "WTP"

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain

dengan tujuan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opini publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan LKIP Tahun 2017 data yang digunakan dari hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2016, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LP2APBD).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 seperti yang tertuang dalam Laporan Nomor 16.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) opini ini sama dengan tahun 2016.

Bukti pemeriksaan yang telah diperoleh BPK diyakini cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dasar Opini WDP adalah :

1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan tindak lanjut yang signifikan atas temuan pemeriksaan tahun sebelumnya sehingga

pengendalian pengelolaan Aset Tetap masih ditemukan belum memadai yaitu : pencatatan Aset Tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) belum akurat dan tidak informatif;

2) Penyajian data aset antara KIB dengan Neraca per 31 Desember 2016 maupun Berita Acara Rekonsiliasi Aset tetap ditemukan selisih;

3) Penyusutan aset yang tidak sesuai data KIB dan tidak didukung kertas kerja penyusutan;

4) Aset Tetap bukan berupa gedung dan bangunan ada yang salah disajikan sebagai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan;

5) Aset Tetap tanah ada yang belum didukung bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanah yang sama dicatat pada SKPD yang berbeda;

6) Terdapat bidang tanah yang belum dicatat dan tanpa informasi lokasi dan nomor sertifikat tanah;

7) Aset Peralatan dan Mesin ada yang tidak dirinci perjenis aset, tidak terdapat nomor register dan kode barang;

8) Aset Tetap Gedung dan Bangunan ada yang tidak memiliki nilai serta minus dan ada kondisi yang rusak berat serta ada yang memiliki nilai dibawah batas kapitalisasi;

9) Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ada yang tidak dirinci jenis dan lokasi asetnya dan ada yang tidak dinilai dan minus;

10) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016 pada Neraca diantaranya berupa Aset Tetap yang belum divalidasi;

11) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan tindak lanjut secara memadai atas temuan pemeriksaan tahun sebelumnya sehingga atas aset tersebut masih tidak dapat ditelusuri rincian data termasuk data keberadaan fisik, kondisi aset serta status kepemilikannya;

12) Perencanaan bentuk aset dan pihak penerima dari kompensasi pelampauan nilai KLB tidak dibahas dengan DPRD untuk menjamin prioritas peruntukan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat;

13) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemungutan pendapatan berupa aset sebagai bentuk tambahan kontribusi reklamasi dari pemohon ijin reklamasi dimana pungutan tersebut belum diatur dalam Peraturan Daerah dan tidak didukung perikatan yang legal dengan pemohon ijin reklamasi untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya perbaikan yaitu sebagai berikut :

1) Pengawasan Pemantauan penyerapan/realisasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa Tahun 2017.

   Inspektorat melakukan pengawasan pemantauan penyerapan/realisasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa dengan hasil pengawasan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 11/LHP.KH/3/V/17 tanggal 4 Mei 2017.

2) Pengawasan pendampingan persiapan Tutup Buku Tahun Anggaran 2017.

   Inspektorat melakukan pengawasan pendampingan persiapan Tutup Buku Tahun Anggaran 2017 dengan hasil pengawasan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 01/LHP.KH/3/I/2018 tanggal 11 Januari 2018.

3) Pengawasan Tutup Buku Tahun Anggaran 2017.

   Inspektorat melakukan pengawasan Tutup Buku Tahun Anggaran 2017 dengan hasil pengawasan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 02/LHP.KH/3/I/2018 tanggal 17 Januari 2018.

4) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Semester I dan II Tahun 2017.

Inspektorat melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Semester I dengan hasil pengawasan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 63/1.922.3.KH tanggal 09 Oktober 2017. Reviu LKPD Semester II melakukan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan cara bersinergi dengan BPKP Provinsi DKI Jakarta pada saat pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 dan dengan menggunakan Tenaga Ahli pada saat pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sasaran Reviu adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Reviu atas LKPD Tahun 2017 masih dalam proses pelaksanaan sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, namun Inspektorat telah melakukan reviu LKPD semester I tahun 2017. Ruang lingkup reviu meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2017. Dari 720 SKPD/UKPD entitas akuntasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya digabung menjadi 43 entitas akuntansi penggabung, yang dilakukan sampling reviu sebanyak 8 (delapan) SKPD, yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan RSUD Pasar Rebo.

5) Berdasarkan Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang rencana aksi percepatan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset menuju perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017 serta mewujudkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat melaksanakan rencana aksi percepatan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset menuju perolehan predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara :

a) Melakukan monitoring dan mendorong penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan

b) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi perolehan predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut Inspektorat telah menyusun Rencana Aksi Opini yaitu sebagai berikut :

a) Koordinasi Dengan BPK & BPKP;
b) Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Tlhp Bersama SKPD;
c) Optimalisasi Tim TGR Inspektorat;
d) Pemanggilan SKPD/Pejabat/Penanggung jawab;
e) Implementasi E-TLHP;
f) Pemutakhiran Data Secara Intensif Dengan BPK Bersama SKPD (Per Triwulan);
g) Mendorong Implementasi Manajemen Aset; dan
h) Pelaporan Kepada Gubernur Secara Berkala.

Untuk mencapai target tersebut terdapat beberapa program yang dilaksanakan yaitu :

Tabel III.4
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Mendorong Peningkatan Predikat LKIP	BB	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2	Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	

Sumber : Inspektorat

Untuk mencapai target tersebut Inspektorat mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.5
Kegiatan pendukung program

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Mendorong Peningkat-an Predikat LKIP	Program Peningkat-an Penga-wasan Pe-nyelenggara an Pemerin-tah Daerah	Pembinaan SKPD/UKPD serta pengawasan kinerja, tugas fungsi, pengelolaan sumber daya dan program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3.000.000.000	2.190.000.000	**73,03%**
2	Mendoro-ng Pening-katan Opini Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah		Pembinaan SKPD/UKPD serta pengawasan kinerja, tugas fungsi, pengelolaan sumber daya dan program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3.000.000.000	2.190.000.000	**73,03%**
			Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas penga-wasan	2.101.127.092	1.420.600.000	**67,61%**

Sumber : Inspektorat

Data-data diatas terkait kegiatan dapat dijabarkan pelaksanaannya yaitu :

a. Hasil yang dicapai dari kegiatan Pembinaan SKPD/UKPD serta pengawasan kinerja, tugas fungsi, pengelolaan sumber daya dan program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatnya predikat LKIP pada tahun 2017.
b. Hasil yang dicapai dari kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas pengawasan adalah telah dilaksanakan kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :
   1) Pengawasan Pemantauan Penyerapan/realisasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa tahun 2017
   2) Pengawasan pendampingan persiapan tutup buku tahun anggaran 2017
   3) Pengawasan tutup buku tahun anggaran 2017
   4) Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2017
   5) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester II Tahun 2017.
c. Hasil yang dicapai dari kegiatan peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan yaitu telah dilaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan semester I dan II oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan didampingi oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta dan tenaga ahli.

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja Mendorong Peningkatan Predikat LKIP pada tahun 2016 yaitu 60,13 atau Predikat "B" atau sebesar 75% persen, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut mempunyai target Predikat "BB" saat ini mendapat nilai 65,05 dengan Predikat "B" naik sekitar 4,92 poin dari nilai capaian tahu 2016.

Sedangkan untuk capaian persentase pada indikator kinerja Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target tahun 2016 yaitu "WTP" namun pada tahun 2017 sampai saat ini capaian realisasi masih menunggu pengumuman penilaian BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Tabel III.6
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Tahun	Mendorong Peningkatan Predikat LKIP			Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	2013	CC	CC	100	WTP	WTP	100
2.	2014	B	CC	75	WTP	WDP	75
3.	2015	B	CC	75	WTP	WDP	75
4.	2016	BB	B	75	WTP	WDP	75
5.	2017	BB	B	75	WTP	Proses Menuju WTP	Proses Menuju WTP

Sumber : Inspektorat

2. MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran Strategis "Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Kesehatan adapun pada sasaran tersebut mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

a. Angka Kematian Ibu dengan target 30/100.000 KH
b. Angka Kematian Bayi dengan target 7,10/1.000 KH
c. Umur Harapan Hidup dengan target 76,80 tahun

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.7
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Angka Kematian Ibu	30/100.000 KH	Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
2	Angka Kematian Bayi	7,10/1.000 KH	Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
	Umur Harapan Hidup	76,68 Tahun	Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan

Untuk mencapai target tersebut Dinas Kesehatan mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.8
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Angka Kematian Ibu					
1.	Program Bina Gizi,	Analisa dan Pengembangan	7,950,000	5,050,000	63.52

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Kesehatan Ibu dan Anak	Program Kesehatan Maternal dengan Komplikasi			
		Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dalam Gedung dan Luar Gedung	10,020,000	9,900,000	98.80
		Penyusunan Panduan Pengembangan Pelaksanaan Program Kekerasan Terhadap Anak / Perempuan	10,020,000	9,900,000	98.80
		Analisa dan Pengembangan Layanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal di Rumah Sakit	56,000,000	22,400,000	40.00
Angka Kematian Bayi					
2.	Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak	Analisa dan Pengembangan Pogram Penatalaksanaan Balita Gizi Kurang	11,900,000	11,700,000	98.32
		Penyusunan Panduan Pengembangan Pelaksanaan Program Anak Berkebutuhan Khusus di Puskesmas	10,020,000	9,900,000	98.80
		Analisa dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	14,584,000	14,440,000	99.01
		Analisa dan Pengembangan Program Penyakit Pneumonia	6,420,000	4,020,000	62.62
		Analisa dan Pengembangan Pogram Penatalaksanaan Balita Gizi Buruk	46,500,000	45,900,000	98.71
Angka Usia Harapan Hidup					
3.	Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak	Surveilans Penyakit berbasis Kematian	12,840,000	12,300,000	95.79

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		Analisa dan Pengembangan Program Penyakit Kusta	24,900,000	23,100,000	92.77
		Analisa dan Pengembangan Program Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	19,260,000	19,260,000	100.00
		Analisa dan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat (PPSM)	35,700,000	27,900,000	78.15
		Analisa dan Pengembangan Penyelenggaraan PHBS dan Kemitraan	3,750,000	3,650,000	97.33
		Penyusunan Panduan Pengembangan Pelaksanaan Program Lansia	10,020,000	9,900,000	98.80
		Analisa dan Pengembangan Media Promkes dan Model Intervensi	3,750,000	3,650,000	97.33
		Promosi kesehatan melalui kampanye ABAT	7,500,000	7,300,000	97.33

Sumber : Dinas Kesehatan

Berikut hasil capaian dari kegiatan yang dilaksanakan pada tabel diatas:

a. Capaian pada kegiatan Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dalam Gedung dan Luar Gedung adalah Puskesmas mampu melaksanakan Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah Dalam Gedung dan Luar Gedung untuk Puskesmas sesuai buku Pedoman dan Panduan.

b. Capaian pada kegiatan Penyusunan Panduan Pengembangan Pelaksanaan Program Kekerasan Terhadap Anak / Perempuan adalah Puskesmas mampu mengembangkan Pelaksanaan Program Kekerasan Terhadap Anak/Perempuan sesuai Buku Panduan.

c. Capaian pada kegiatan Analisa dan Pengembangan Layanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal di Rumah Sakit adalah Peserta PONEK mampu tata laksana Kegawatdaruratan Obstetri Neonatologi.
d. Capaian pada kegiatan Penyusunan Panduan Pengembangan Pelaksanaan Program Anak Berkebutuhan Khusus di Puskesmas adalah Puskesmas mampu mengembangkan Pelaksanaan Program Anak Kebutuhan Khusus di Puskesmas sesuai Buku Panduan.
e. Capaian pada kegiatan Analisa dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita adalah Puskesmas mampu mengembangkan Program Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita sesuai dengan Buku Panduan.
f. Capaian pada kegiatan Penyusunan Panduan Pengembangan Pelaksanaan Program Lansia adalah Puskesmas mampu mengembangkan pengembangan Program Lansia sesuai Buku Panduan.

Tabel III.9
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Tahun	Angka Kematian Ibu			Angka Kematian Bayi			Umur Harapan Hidup		
		Trget	Real	%	Trget	Real	%	Trget	Real	%
1.	2014	50	59.02	N/A	7.4	4,18	N/A	76.50	72.20	77.15
2.	2015	40	56.54	N/A	7.3	4,61	N/A	76.60	74.04	73.81
3.	2016	35	53.22	N/A	7,20	4,1	N/A	76,70	72.49	68.66
4.	2017	30	45.03	N/A	7,10	2,53	N/A	76,80	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan

Kendala yang ditemui dalam mencapai capaian yaitu sebagai berikut :

a. Angka capaian ini merupakan angka dari hasil laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan, seharusnya angka ini didapat dari hasil survey kesehatan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
b. Adanya efisiensi pembelian makanan dan minuman pada pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terserap seluruhnya, namun kegiatan dapat terlaksana dengan baik
c. Dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa narasumber tidak dapat dibayarkan honornya karena statusnya PNS Pemprov DKI Jakarta dan Tidak bisa dilaksanakan di semua RSUD karena keterbatasan waktu.

3. MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN BAGI SEMUA MASYARAKAT

Sasaran Strategis "Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Pendidikan, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "rata-rata lama sekolah" dengan target capaian 11.87.

Angka-angka rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihasbiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variable pendidikan formal yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (badan pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Angka rata – rata lama sekolah akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks pembangunan Manusia (IPM) atau *human development index* yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup dan melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara adalah Negara maju, negara aberkembang atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup si suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah akan menjadi satu dari komponen yaitu : angka melek huruf, angka rerata lama sekolah serta pengeluaran perkapita.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.10
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Angka rata-rata lama sekolah	11.87	Program wajib belajar 12 tahun
2			

Sumber : Dinas Pendidikan

Untuk mencapai target tersebut Dinas Pendidikan mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.11
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Angka rata-rata lama sekolah					
1.	Program wajib belajar 12 tahun	Biaya Operisonal pendidikan tingkat SD, SMP, SMA dan SMK	2,388,155,717,614	2,071,339,305,950	**86.73%**
		Bantuan Operasional sekolah tingkat TKN, SD, SLBN, SMP, SMA dan SMK			

Sumber : Dinas Pendidikan

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 sebanyak 10.74, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target sebanyak 11.87 telah mencapai capaian sebanyak 10.88 atau sebesar 91.66 persen.

Tabel III.12
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata lama sekolah	Persen	10.47	10.54	10.70	10.74	10.88

Sumber : Dinas Pendidikan

Untuk mencapai capaian diatas Dinas Pendidikan menjalankan program wajib belajar 12 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 2.388.155.717.614 dan terealisasi sebesar Rp. 2.071.339.305.950 atau sebesar 86.73%.

4. MENINGKATNYA PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR KEPADA KORBAN BENCANA

Sasaran Strategis "Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar kepada korban bencana" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Response time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana" dengan target capaian selama "3 jam".

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.13
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Response time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana	3 jam	Program tindakan kedaruratan pada saat bencana dan pasca bencana
			Program Pengelolaan Sarana Infeormatika, data dan informasi pelaporan bencana

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mencapai target tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.14
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Response time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana					
1.	Program tindakan kedaruratan pada saat bencana dan pasca bencana	Penyediaan, perlengkapan penanganan bencana daerah	186,261,224	165,931,425	89.09%
2.	Program pengelolaan sarana informatika, data dan informasi pelaporan bencana	Pelayanan pengendalian penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta	2,855,554,544	2,717,327,535	95.16%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana BPBD Provinsi DKI Jakarta melakukan kaji cepat di lokasi bencana meliputi lokasi kejadian, kerusakan akibat bencana, kerugian yang ditimbulkan, kebutuhan pengungsi dan kebutuhan sumber daya serta pengerahannya.

Dari 1.182 kejadian, sebanyak 70 kejadian bencana yang ditetapkan sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) Penanggulangan Bencana < 3 jam. 70 kejadian tersebut merupakan kejadian yang ditangani BPBD Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan SKPD / UKPD terkait, selebihnya merupakan

kejadian kecil yang tidak memerlukan penanganan khusus BPBD (tidak adanya pengungsi).

Dari total jumlah pengungsi 16.793 jiwa, sebanyak 10.162 jiwa dari 61 kejadian yang terjadi selama tahun 2017 adalah pengungsi korban bencana kebakaran dan 6.631 jiwa dari 9 kejadian merupakan pengungsi korban banjir.

Grafik III.1

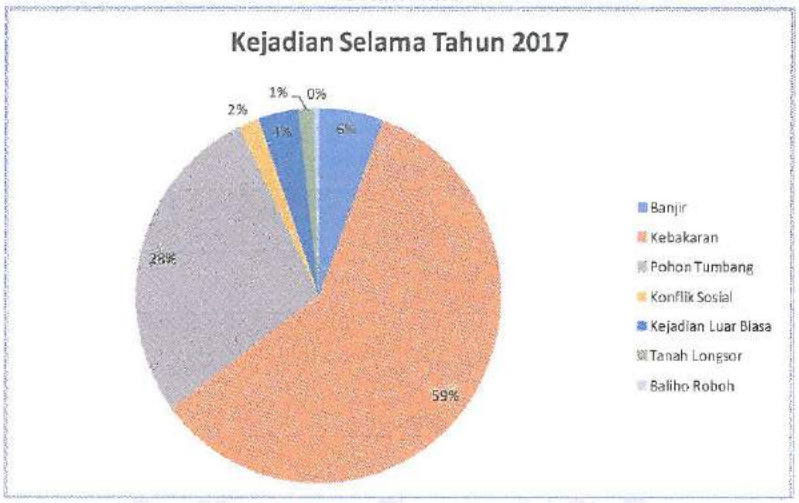

Kejadian kebakaran mendominasi yakni sebanyak 59% atau setara terjadi kebakaran di wilayah DKI Jakarta selalu terjadi kebakaran setiap hari sebanyak 2 kejadian (698 kasus), selain kebakaran pohon tumbang merupakan kejadian terbanyak kedua yang banyak disebabkan oleh hujan yang disertai angin kencang (296 kasus), dan banjir menjadi jumlah terbanyak ketiga dengan prosentase 6% (66 kasus).

Kejadian terbesar yang terjadi selama tahun 2017 diantaranya pada kejadian bencana kebakaran di Jln. RE Martadinata RW 05 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada 16 September 2017 yang menyebabkan 1.890 rumah semi permanen terbakar, 833 KK dan 2.500 Jiwa terdampak dan jumlah pengungsi 1.792 jiwa dan kejadian banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cawang, Kelurahan Rawa Terate (Jakarta Timur), Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kembangan Utara, Kelurahan Tegal Alur, Kelurahan Duri Kosambi (Jakarta Barat), Kelurahan Serdang (Jakarta Barat) pada 19 s.d 24 Februari 2017 dengan tertinggi mencapai 250 cm dengan

durasi 5 hari yang terjadi di Kelurahan Cipinang Melayu yang menyebabkan 3.314 KK, 9.598 jiwa terdampak dan sebanyak 4.210 jiwa mengungsi.

Berdasarkan hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provonsi DKI Jakarta selama tahun 2017 telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dengan cara pendistribusian logistik di 51 lokasi pengungsian yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun pendistribusian logistik untuk korban bencana berdasarkan jenis kejadian selama tahun 2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik III.2
pendistribusian logistik berdasarkan jenis kejadian bencana pada Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta

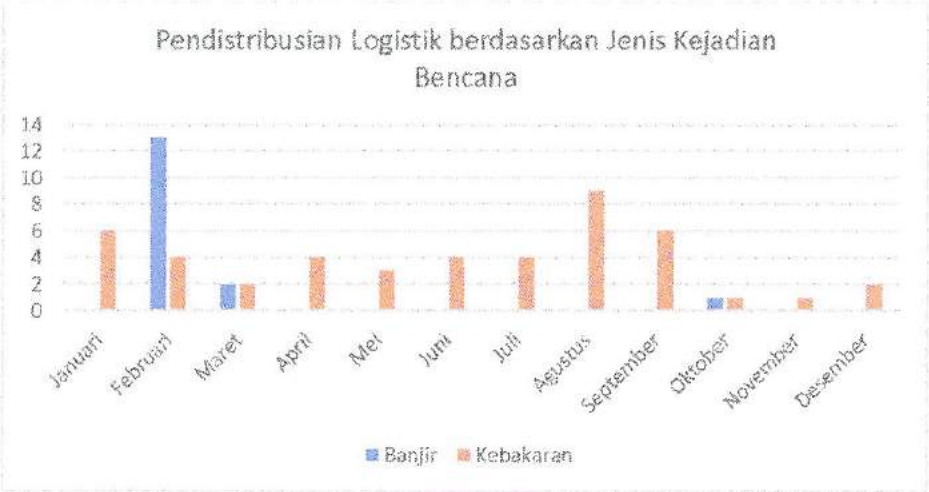

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja Response time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada tahun 2016 selama 3 jam atau sebesar 100 persen, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target selama 3 jam telah mencapai capaian sebanyak 3 jam atau sebesar 100% persen.

Tabel III.15
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Response time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana	3 jam	3 jam	100%	3 jam	3 jam	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peningkatan hasil capaian response time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana tahun 2017 dari tahun ke tahun sebelumnya mencapai target, akan tetapi masih terdapat kendala dalam mencapai target tersebut, yaitu sebagai berikut :

- Masih kurangnya jumlah *seat agent call center* Jakarta 112.

5. PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Sasaran Strategis "Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu" dengan target capaian 100 persen.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terbentuk pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD yang dibentuk dari penggabungan antara Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di dukung oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 (lima) wilayah Kota Administrasi, 1 (satu) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi, Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST), Unit Penanganan Kebersihan Badan Air (UPK BA) dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (UPT LLHD).

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.16
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu	100%	1. Program Peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum
			2. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah
			3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai target tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.17
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu					
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1. Pengadaan Alat Angkut Kebersihan Truk Compactor	125,000,000,000	112,950,498,000	90.36
		2. Pengadaan Alat-alat berat kebersihan	164,500,000,000	128,513,335,920	78.12
		3. Pengadaan alat angkut kebersihan Gerobak Motor	50,000,000,000	49,303,000,000	98.61
		4. Pengadaan alat berat kebersihan air	322,519,604,627	266,708,257,401	82.70
2.	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan (Dinas)	9,310,647,800	8,695,123,024	93.39
		2. Pengadaan Ban Kendaraan Operasional	12,407,099,034	1,653,815,680	13.33
		3. Pengadaan Tong Sampah Beroda	5,305,300,000	3,676,813,920	69.30
		4. Penyediaan Jasa Jalan Tol	380,590,000	59,904,500	15.74
		5. Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan	54,618,966,666	50,291,434,277	92.08

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		(Unit Pengelola Sampah Terpadu)			
		6. Covering Landfill	33,336,435,770	18,212,339,750	54.63
		7. Jasa Jalan Tol Kendaraan Angkutan Sampah (Unit Pengelola Sampah Terpadu)	298,393,920	2,209,000	0.74
		8. Jasa Pendampingan Pengelolaan Sampah	829,600,000	623,600,000	75.17
		9. Pemeliharaan Drainase TPST Bantargebang	5,420,929,116	5,158,500,000	95.16
		10. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus (Unit Pengelola Sampah Terpadu)	43,870,210,560	37,347,209,375	85.13
		11. Pengadaan Penyediaan Jasa Tol (Unit Penanganan Kebersihan Badan Air)	2,230,150,000	127,119,500	5.70
		12. Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Pusat	39,852,239,784	32,648,134,523	81.92
		13. Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara	70,866,040,684	61,884,727,544	87.33
		14. Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat	67,542,895,190	59,076,665,429	87.47
		15. Penanganan Kebersihan	47,277,441,592	41,119,349,001	86.97

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Selatan			
		16. Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Timur	81,564,972,390	71,060,684,305	87.12
		17. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus (Unit Penanganan Kebersihan Badan Air)	83,912,766,225	11,152,430,788	13.29
3.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup	1. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus (Dinas)	7,763,030,415	1,246,022,570	16.05
		2. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus (Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	47,628,000	13,207,200	27.73

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu pada tahun 2016 sebanyak 85.49 persen, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target sebanyak 100% telah mencapai capaian sebanyak 86.91% atau sebesar 86.91 persen.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{sampah yang terangkut}}{\text{Timbulan sampah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\mathbf{6.875,49}\ \text{ton/hari}}{\mathbf{7.911}\ \text{ton/hari}} \times 100\%$$

Realisasi = 86,91%

Tabel III.18
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu	0.98	0.83	85.49%	100%	86.91%	86.91%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Tabel III.19
Data timbulan sampah provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Jumlah penduduk (orang) (1)	TimbulanSampah (L/orang/hari)* (2)	Berat jenis (kg/L)* (3)	Timbulan Sampah DKI Jakarta (ton/hari) (4) = (1)x(2)x(3)
11.426.773	3,4004	0,2036	7.911

*Keputusan Kepala DInas Kebersihan Nomor 334 Tahun 2013 tentang timbulan, komposisi dan karakteristik sampah di Provinsi DKI Jakarta

Tabel III.20
Data Laporan Penimbangan Sampah di TPST Bantargebang Tahun 2017

NO	WILAYAH	TONASE
1	UPK Badan Air	71.215,37
2	Dinas	25.627,85
3	Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu	2.379,49
4	Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat	317.488,42
5	Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara	382.871,52
6	Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat	472.871,83
7	Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan	495.296,95
8	Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur	572.349,93
9	Sampah Pasar	94.253,21
10	Pengelolaan Kawasan Mandiri	82.076,46
	TOTAL	**2.516.431,03**
	RATA-RATA PERHARI (TON)	**6.875,49**

Peningkatan hasil capaian Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 dari tahun ke tahun sebelumnya tidak mencapai target, banyak faktor yang melandasi tidak tercapainya target tersebut, namun dapat dikerucutkan kedalam beberapa faktor utama, yaitu sebagai berikut :

a. Prilaku masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi jadwal buang sampah yang telah disepakati

b. Belum terwujudnya pembangunan ITF/PLTSa dalam kota dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan

c. Kurangnya TPS di daerah padat penduduk

Solusi :

a. Penindakan tegas terhadap masyarakat yang melanggar jadwal buang sampah
b. Mengupayakan terwujudnya pembangunan ITF/PLTSa dalam kota dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan
c. Menambah jumlah TPS

6. Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha/swasta dalam Melakukan Pengelolaan Sampah

Sasaran Strategis "Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam melakukan pengelolaan sampah" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber" dengan target capaian 15%.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.21
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber	15%	Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai target tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.22
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber					
1.	Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber	1. Apresiasi Masyarakat Peduli Persampahan	156,290,475	121,504,800	77.74
		2. Penyediaan Mesin Pencacah Sampah	121,849,650	121,281,850	99.53
		3. Penyediaan Tong Composter	73,920,000	36,960,000	50.00

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		4. Pengadaan Timbangan Elektrik Untuk Bank Sampah	198,000,000	198,000,000	100.00
		5. Peningkatan Kualitas Pengolahan Kompos pada tempat-tempat Pengolahan 3R	59,069,560	40,761,000	69.01

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja persentase pengurangan timbulan sampah di sumber pada tahun 2016 sebanyak 69.53 persen, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target sebanyak 15 persen dengan realisasi sebesar 13.09% atau mencapai capaian 87.27 persen.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{jumlah timbulan sampah} - \text{jumlah sampah di TPST}}{\text{timbulan sampah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\mathbf{7.911}\ \text{ton/hari} - \mathbf{6.875,49}\ \text{ton/hari}}{\mathbf{7.911}\ \text{ton/hari}} \times 100\%$$

Realisasi = 13,09%

Tabel III.23
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber	15%	10.43%	69.53%	15%	13.09%	87.27%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Peningkatan hasil capaian Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 dari tahun ke tahun sebelumnya tidak mencapai target, banyak faktor yang melandasi tidak tercapainya target tersebut, namun dapat dikerucutkan kedalam beberapa faktor utama, yaitu sebagai berikut :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa sampah mempunyai nilai ekonomis

b. Kurangnya bank sampah yang tersebar di wilayah kecamatan

c. Belum mampunya masyarakat dalam mengolah sampah secara mandiri

d. Masih tingginya konsumsi masyarakat yang menggunakan barang penghasil sampah seperti plastik, Styrofoam

e. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggar aturan pengelolaan sampah

Solusi:

a. Sosialisasi kepada masyarakat supaya sadar pentingnya pengelolaan sampah di sumber
b. Mendorong bertambahnya jumlah bank sampah di kecamatan dan kelurahan
c. Menfasilitasi dan mengedukasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah
d. Membatasi penggunaan barang penghasil sampah melalui regulasi ke dunia usaha (produsen makanan)
e. Mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam rangka Penegakan Perda 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

7. MENINGKATNYA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Sasaran Strategis "Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Presentase pencari kerja yang ditempatkan" dengan target capaian sebesar 85% dari seluruh pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.24
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Presentase pencari kerja yang ditempatkan	85% dari seluruh pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan	Program Peningkatan Kesempatan kerja dan Peningkatan sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
2			

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam rangka pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Pelaksana penempatan tenaga kerja di fasilitasi oleh fungsional pengantar kerja yang bertugas memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk menemukan dan memiliki pekerjaan yang produktif sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya baik di perusahaan atau berwirausaha. Lebih spesifiknya pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan yang sifatnya memfasilitasi antara pencari kerja dengan Pemberi Kerja atau perusahaan yang mencari calon karyawan dengan kualifikasi tertentu terkait lowongan kerja yang ada. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi memfasilitasi mempertemukan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan di Perusahaan sebagai pemberi kerja dan pelayanan kepada pemberi kerja (perusahaan) untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai kualifikasi yang diminta. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja ini lah yang menjadi salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi jumlah pengangguran di DKI Jakarta.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar (AK/I) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 tercatat 29.548 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 25.121 orang. Sebagian besar terserap di Pasar Kerja atau bekerja di Perusahaan dan sebagian kecil memilih berwira usaha mandiri. Untuk tahun 2017, 85% dari pencari kerja telah ditempatkan, artinya Capaian Kinerja untuk penempatan tenaga kerja pada tahun 2017 telah berhasil mencapai target sebesar 85 %.

Untuk mencapai target tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai beberapapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.25
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Presentase pencari kerja yang ditempatkan					
1.	Program Peningkatan Kesempatan kerja dan Peningkatan sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Pemberdayaan Tenaga Kerja	446,592,574	422.392.773	**94,58%**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja Presentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2016 sebanyak 73.18 persen atau sebesar 91.48 persen, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target sebanyak 85 persen telah mencapai capaian sebesar 85.02 persen atau sebesar 100.02 persen.

Tabel III.26
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	presentase pencari kerja yang di tempatkan	80%	73.18%	91.48%	85%	85.02%	100.02%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terjadi banyak faktor yang menghambat pencapaian target tersebut, namun dapat dikerucutkan kedalam beberapa faktor utama, yaitu sebagai berikut :

a. Jumlah fungsional Pengantar Kerja yang terus menurun mempengaruhi jumlah pencari kerja yang ditempatkan.

b. Pengangguran terbuka di DKI Jakarta masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah yaitu setingkat SD, SMP dan SMA/SMK.

c. Lemahnya kompetensi yang dimiliki pencari kerja.

d. Ketidaksesuaian keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan

e. Banyak Perusahaan yang mempunyai lowongan pekerjaan yang tidak melapor komposisI lowongan yang tersedia ke Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta.

f. Lowongan pekerjaan yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki pencari kerja.

g. Motivasi yang lemah dari pencari kerja yang tidak bersedia di tempatkan perusahaan yang jauh dari tempat tinggalnya.

B. MENINGKATNYA KURIKULUM PELATIHAN KETERAMPILAN PUSAT PELATIHAN KERJA (PPK) SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PASAR KERJA

Sasaran Strategis "Meningkatnya kurikulum pelatihan keterampilan pusat pelatihan kerja (PPK) sesuai dengan kebutuhan pasar kerja" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Presentase jumlah lulusan pusat pelatihan kerja (PPK) yang ditempatkan" dengan target capaian sebesar 80% dari jumlah lulusan PPK yang ditempatkan.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.27
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Presentase Jumlah Lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PKK) yang ditempatkan	80% dari jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan	Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Peningkatan Pelayan Pusat Pelatihan Kerja

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Untuk mencapai target tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai beberapapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.28
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Presentase Jumlah Lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan					

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Peningkatan Pelayan Pusat Pelatihan Kerja	Pelatihan Keterampilan Kerja dan Mobile Training Unit	108,828,400	97,606,946	**89.69%**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Secara umum, Pusat Pelatihan Kerja adalah lembaga pelatihan milik pemerintah yang digunakan sebagai tempat berlatih dan menambah ketrampilan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Pelatihan kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 Pasal 1 ayat 1 adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori. Pelatihan Kerja adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi, sehingga peserta pelatihan belajar pengetahuan teknik dan keahlian tertentu untuk tujuan menambah keterampilan dan kompetensi sesuai dengan pasar kerja.

Pelatihan yang diadakan oleh Pusat Pelatihan Kerja berguna untuk membekali keterampilan kepada peserta dalam berbagai bidang kejuruan dan memberikan motivasi untuk berusaha mandiri. Adapun sasaran kegiatan ini adalah terciptanya tenaga kerja yang terampil, disiplin, dan memiliki etos kerja produktif sehingga mampu mengisi kesempatan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja melalui usaha mandiri. Pusat Pelatihan Kerja dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga pelatihan kerja yang berdedikasi mencetak tenaga kerja yang siap terjun ke dalam dunia kerja. Dengan tersedianya Pusat Pelatihan Kerja dapat menjadi langkah efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja di daerah. Dengan demikian, alumni Pusat Pelatihan Kerja akan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kerja untuk mengembangkan diri dalam dunia industri maupun usaha wiraswasta secara mandiri.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan kerja merupakan bagian integral dari sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, profesional untuk memenuhi kebutuhan dalam mengisi pasar kerja atau untuk usaha mandiri dalam rangka mengurangi jumlah penganggur yang ada.

Penempatan Pelatihan Di Pusat Pelatihan Kerja adalah proses pelayanan kepada lulusan Pusat Pelatihan Kerja untuk memperoleh pekerjaan di Perusahaan atau melakukan usaha Mandiri. Lulusan Pusat Pelatihan Kerja akan difasilitasi dan dipertemukan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan ketrampilan dan kompetensinya. Sehingga lulusan Pelatihan kerja di Pusat Pelatihan Kerja mendapat pekerjaan di perusahaan sesuai dengan keterampilan dan kompetensinya.

Jumlah pencari kerja yang telah di latih di tujuh Pusat Pelatihan Kerja Di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sebanyak 5.316 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 4235 orang atau sebesar 79,66%. Sebagian besar Peserta pelatihan telah terserap di Pasar Kerja atau bekerja di Perusahaan dan sebagian kecil memilih menjadi tenaga kerja mandiri atau berwirausaha. Untuk tahun 2017, 79,66% dari pencari kerja telah ditempatkan, artinya Capaian Kinerja untuk penempatan tenaga kerja bagi lulusan pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja pada tahun 2017 belum berhasil mencapai target sebesar 80 % terpaut 0,3% dari target.

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja Presentase jumlah lulusan pusat pelatihan kerja (PPK) yang ditempatkan pada tahun 2016 sebesar 78 persen atau mecapai capaian 70 persen dari target, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target sebanyak 80 persen telah mencapai capaian sebesar 79.67 persen atau sebesar 99.59 persen.

Tabel III.29
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Presentase Jumlah Lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PKK)	78%	70%	70%	80%	79.67%	99.59%

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	yang ditempatkan						

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terjadi banyak faktor yang melandasi tidak tercapainya target tersebut, namun dapat dikerucutkan kedalam beberapa faktor utama, yaitu sebagai berikut :

a. Jumlah fungsional Pengantar Kerja yang terus menurun mempengaruhi jumlah pencari kerja yang ditempatkan.

b. Jumlah fungsional Instruktur sangat kurang di bandingkan jumlah peserta pelatihan.

c. Pengangguran terbuka di DKI Jakarta masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah yaitu setingkat SD, SMP dan SMA/SMK.

d. Lemahnya motivasi dan kompetensi yang dimiliki pencari kerja.

e. Kendala teknis dalam proses Lelang yang mengakibatkan proses pelatihan menjadi mundur.

f. Honor instruktur Pelatihan non PNS yang relatif kecil.

g. Jumlah Kelas yang kurang di bandingkan jumlah pencari kerja yang ingin mengikuti pelatihan.

9. TERSEDIANYA SISTEM TATA AIR YANG OPTIMAL DALAM MENDUKUNG UPAYA PENGENDALIAN BANJIR, BANJIR ROB DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM LAINNYA

Sasaran Strategis "Tersedianya Sistem Tata Air yang Optimal dalam Mendukung Upaya Pengendalian Banjir, Banjir ROB dan Dampak Perubahan Iklim Lainnya" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Sumber Daya Air, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yang terdiri dari :

a. Terlaksananya Pengerukan Sungai dengan target capaian sebesar 30,486 m; dan

b. Panjang pengaman pantai yang terbangun dengan target capaian sebesar 1,099 m.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.30
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Terlaksananya pengerukan sungai	30,486m	Program Pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir dan drainase
2	Panjang Pengaman pantai yang terbangun	1,099m	Program pembangunan prasarana dan sarana peng-endali banjir

Sumber : Dinas Sumber Daya Air

Untuk mencapai target tersebut Dinas Sumber Daya Air mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.31
Kegiatan pendukung program

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Terlaksananya pengerukan kali/ sungai	Program Pemeliharaan prasaran dan sarana pengendalian banjir dan Drainase	Pengerukan kali/ Sungai Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat	9,756,833,087	8,915,301,495	**91.37%**
		Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran Tengah	13,148,222,315	9,366,899,442	**71.24%**
		Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran Timur	14,206,701,529	10,723,190,928	**75.48%**
2.	Panjang Pengaman Pantai yang Terbangun.	Program Pembangunan Prasaran dan Saran Pengendalian Banjir	Pembangunan Tanggul Pantai Fase A NCICD Kali Kamal Bidang Aliran Barat.	23,343,861,900	17,065,424,860	**73.10%**

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		Program Pembangunan Prasaran dan Saran Pengendalian Banjir	Pembangunan Tanggul Pantai Fase A NCICD Kali Belencong Bidang Aliran Timur	59,650,729,041	36,718,671,659	**61.56%**

Sumber : Dinas Sumber Daya Air

Data-data diatas terkait kegiatan dapat dijabarkan pelaksanaannya yaitu :

a. Terlaksananya pengerukan sungai, dengan target yang harus dicapai pada tahun 2017 yaitu 30.486 m³. Indikator kinerja ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Sistem Drainase dengan kegiatan antara lain:

   1) Pengerukan Sungai/Kali di Provinsi DKI Jakarta Bidang Aliran Barat berupa pengerukan:
      - Kali Mokervart sepanjang 1151,5 m
      - Kali Grogol sepanjang 195 m.
      - Kali Sekretaris sepanjang 730 m.
      - Kali Semanan sepanjang 411,11 m.
      - Kali Grogol Hankam sepanjang 1400 m.

   2) Pengerukan Sungai/ Kali di Provinsi DKI Jakarta Bidang Aliran Tengah berupa pengerukan :
      - Kali Ciliwung Gajah Mada sepanjang 2.338 m.
      - Kali Krukut Kemang sepanjang 855,3 m.
      - Kali Ciliwung Manggarai sepanjang 3.999,8 m.
      - Kali Ciliwung Istiqlal sepanjang 250,3 m.

   3) Pengerukan Sungai/ Kali di Provinsi DKI Jakarta Bidang Aliran Timur diberupa pengerukan :
      - Kali Cakung Lama sepanjang 2.783,8 m.
      - Kali Mati Pademangan sepanjang 227 m.
      - Kali Lagoa Kanal sepanjang 319 m.
      - Kali Cakung Drain sepanjang 319 m.
      - Kali Cipinang Halim RW 05 sepanjang 202 m.

Total realisasi dari indikator kinerja panjang kali/sungai yang dikeruk yaitu sebesar 13.061,01 m atau sebesar 42.843% dari yang ditargetkan.

b. Terlaksananya pembanguanan tanggul pantai fase A, dengan target yang dicapai pada tahun 2017 yaitu 1.099 m. Indikator kinerja ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir, kegiatan pembangunan tanggul pantai antara lain :

1) Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pengendali Banjir, Pembanguna tanggul pantai NCICD Kamal Muara Bidang Aliran Barat adalah :
   - Pembangunan Tanggul Pantai NCICD Kamal Muara sepanjang = 154,50 m.

2) Pembanguan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pengendali Banjir, Pembanguna tanggul pantai NCICD Kali Belencong Bidang Aliran Timur adalah :
   - Pembangunan Tanggul Pantai NCICD Kali Belencong sepanjang = 336,64 m.

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja panjang kali/ sungai yang dikeruk pada tahun 2016 sepanjang 27.844 m atau sebesar 47,75 persen, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target sepanjang 30.486 m telah mencapai capaian sepanjang 15,049.08 m atau sebesar 49.36 persen.

Sedangkan untuk capaian persentase pada indikator kinerja terlaksananya pembangunan tanggul pantai yang terbangun dengan target tahun 2016 sepanjang 4.451 m dengan realisasi sepanjang 2.341,20 atau sebesar 52,59 persen dan pada tahun 2017 pada indikator tersebut dengan target 1.099 m dengan ralisasi sepanjang 491,14 m atau sebesar 44,69 persen.

Tabel III.32
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Terlaksananya pengerukan sungai	27.844 m	13,296.25 m	47,75%	30.486 m	15,049.08 m	49.36%
2.	Panjang pengaman pantai yang terbangun	4.451 m	2,341.20 m	52,59%	1.099 m	491.14 m	44.69%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air

Dari data capaian diatas, terdapat beberapa kendala yang ada, terdiri dari :

a. Kendala yang ada pada indikator terlaksananya pengerukan sungai adalah Lahan yang tidak bebas sehingga menyulitkan pelaksanaan dalam mobilisasi alat berat.
b. Kendala yang ada pada indikator panjang pengaman pantai yang terbangun yaitu Lahan yang belum sepenuhnya bebas.
c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan perbaikan infrastruktur saluran/kali terdapat kendala yaitu lokasi yang sangat sulit dijangkau dengan alat-alat berat.
d. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tanggul pantai fase A NCICD Provinsi DKI Jakarta.

10. TERSEDIANYA JARINGAN JALAN DAN TROTOAR DENGAN KUALITAS YANG MANTAP UNTUK MELAYANI SIRKULASI DARI/KE DALAM KOTA

Sasaran Strategis "Tersedianya Jaringan Jalan dan Trotoar dengan Kualitas yang Mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Bina Marga, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 2 (dua) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu terdiri dari :

a. Persentase Kondisi Jalan dalam Kondisi baik pada Jaringan Jalan Arteri/Kolektor Sekunder dengan target 98,00%; dan
b. Panjang trotoar yang terbangun pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder dengan target 12.180m.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.33
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Persentase Kondisi Jalan dalam Kondisi baik pada Jaringan Jalan Arteri/Kolektor Sekunder	**98,00%**	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan
2	Panjang trotoar yang terbangun pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder	**12.180m**	a. Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan b. Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan

Sumber : Dinas Bina Marga

Untuk mencapai target tersebut Dinas Bina Marga mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.34
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Persentase Kondisi Jalan dalam Kondisi baik pada Jaringan Jalan Arteri/Kolektor Sekunder					
1.	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	Pembangunan/ pening-katan jalan-jalan strategis di Provinsi DKI Jakarta	412.93 miliar	368.69 miliar	89,29
		Peningkatan Jalan Lajur Busway di Provinsi DKI Jakarta	139387 miliar	134.97 miliar	96,50
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan	Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri, Kolektor di 5 wilayah Kota Adminstratif	350 miliar	309.71 miliar	88.49
Panjang trotoar yang terbangun pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder					
1.	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	Penataan Jalur Pedestrian sepanjang jalan arteri/kolektor di 5 wilayah Kota Adminstratif	119,99 milyar	118,53 milyar	98.78

Sumber : Dinas Bina Marga

Realisasi kegiatan-kegiatan untuk kegiatan Pembangunan/ Peningkatan jalan-jalan strategis di Provinsi DKI Jakarta adalah seluas 714.692 m^2 atau 170,91% dari target 418.169 m^2. Sedangkan kegiatan Peningkatan Jalan Lajur Busway di Provinsi DKI Jakarta terlaksana seluas 62.127 m^2 atau 235,15% dari target 26.420 m2 . Sedangkan untuk Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan dan kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri, Kolektor di 5 wilayah Kota Adminstratif terlaksana seluas 1.454.496 m^2 atau 230,71% dari target 630.448 m^2.

Adapun kondisi jalan mantap di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.35
Kondisi Jalan Mantap Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Wilayah	Kategori Jalan			Total	Kondisi Mantap 2017	
	Arteri Sekunder	**Kolektor Sekunder**	**Lokal**		**Luas (M2)**	**%**
			Arteri/ Kolektor Sekunder			
Panjang (M')	665.534	780.437		1.445.971	17.470.121	99,70%
Luas (m2)	10.888.964	6.633.725		17.522.689		
			Jakarta Pusat			
Panjang (M')	93.656	149.575	446.198		2.226.355	99,70%
Luas (m2)	2.158.072	1.567.003	2.233.054			
			Jakarta Utara			
Panjang (M')	118.848	108.556	787.378		3.366.497	82,77%
Luas (m2)	1.803.031	871.752	4.067.130			
			Jakarta Barat			
Panjang (M')	127.544	149.566	750.735		3.209.185	89,94%
Luas (m2)	1.737.212	1.152.048	3.568.174			
			Jakarta Selatan			
Panjang (M')	157.840	192.203	1.597.058		7.139.064	93,56%
Luas (m2)	2.522.585	1.546.302	7.630.682			
			Jakarta Timur			
Panjang (M')	167.646	180.537	1.061.226		4.642.306	99,43%
Luas (m2)	2.668.064	1.496.620	4.668.913			
			Total DKI Jakarta			
Panjang (M')		**1.445.971**	**4.642.595**	**6.088.566**	**38.053.527**	**95,88%**
Luas (m2)		**17.522.689**	**22.167.952**	**39.690.641**		

Sumber : Dinas Bina Marga

Sedangkan Panjang Trotoar yang terbangun pada Jaringan Jalan Arteri/ Kolektor Sekunder, dari target yang harus dicapai di tahun 2017 adalah 12.180 m, dan telah mencapai realisasi 24.640 m atau 200,82 % dari target 12.180 m.

Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2017 seluruh Indikator Kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Dan dari data tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu:

a. Target indikator kinerja yang diukur telah dicapai dengan baik. Indikator kinerja ini harus tetap dipertahankan dimasa yang akan datang untuk mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2018 – 2022.

b. Untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang, Indikator Kinerja untuk kondisi jalan mantap perlu ditingkatkan menjadi kondisi jalan mantap di Provinsi DKI Jakarta, sehingga perhitungan indikator kinerjanya nanti juga meliputi jalan lokal di Lima Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

Adapun capaian pada masing-masing indikator yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai capaian terdiri dari:

Tabel III.36
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Kondisi Jalan dalam Kondisi baik pada Jaringan Jalan Arteri/ Kolektor Sekunder	-	-	-	98,00	95,88%	97,84%
2.	Panjang trotoar yang terbangun pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder	8.000m	8.606m	107,57	12.180m	24.460m	200,82

Sumber : Dinas Bina Marga

11. TERSEDIANYA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN YANG TERPADU DAN MEMADAI UNTUK MELAYANI PERGERAKAN ORANG DAN BARANG

Sasaran Strategis "Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Perhubungan, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Jumlah penumpang busway perhari" dengan target capaian sebanyak 506.000 penumpang/perhari.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.37
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Jumlah Penumpang busway perhari	506.000 pnp/hari	Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan

Sumber : Dinas Perhubungan

Untuk mencapai target tersebut Dinas Perhubungan mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.38
Kegiatan pendukung program

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Jumlah Penumpang busway perhari	Program Pembangunan Angkutan Umum berbasis jalan	Survey Capaian SPM Transjakarta Busway	2.069.192.400	1.661.477.400	**80,30%**

Sumber : Dinas Perhubungan

Data-data diatas terkait kegiatan dapat dijabarkan pelaksanaannya yaitu :

a. Jumlah penumpang busway perhari, dengan target yang harus dicapai pada tahun 2017 yaitu 506.000 pnp/hari. Indikator kinerja ini merupakan bagian dari Program Pembangunan angkutan umum berbasis jalan dengan kegiatan Suveri Capaian SPM Transjakarta Busway dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 2.069.192.400,-.

   Berdasarkan realisasi capaian kinerja pada table diatas diperoleh jumlah penumpang busway perhari sebesar 385.185 penumpang / hari atau sebesar 76,12 % dari target sebesar 506.000 penumpang / hari. Jumlah penumpang Transjakarta terbagi dalam 2 (dua) segmen, yaitu jumlah penumpang dalam koridor dan jumlah penumpang non koridor. Koridor Transjakarta di Tahun 2017 terdiri dari 13 koridor, sedangkan non koridor Transjakarta terdiri dari:

   1) Angkutan umum integrasi terdiri dari 32 rute
   2) Angkutan umum integrasi Rumah Susun terdiri dari 22 rute
   3) Transjabodetabek terdiri dari 11 rute
   4) Angkutan umum wisata terdiri dari 5 rute
   5) Angkutan umum lainnya terdiri dari 3 rute

   Realisasi capaian penumpang pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana pada gambar berikut.

Grafik III.3
Realisasi Capaian Penumpang

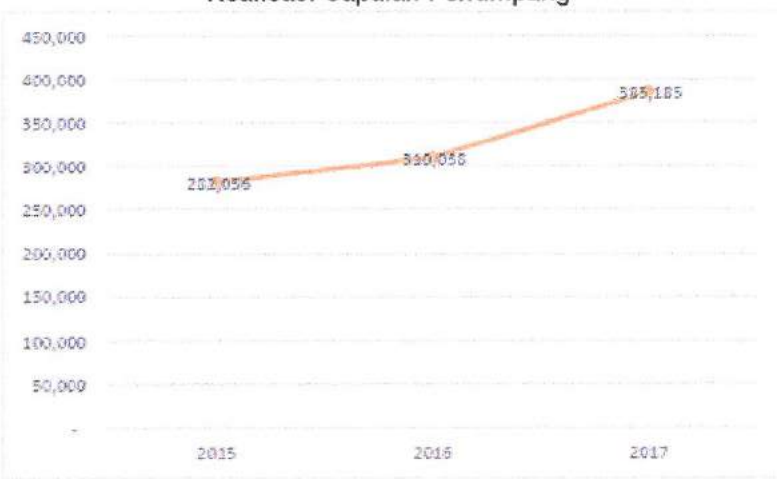

Sumber : Dinas Perhubungan

Peningkatan jumlah penumpang dikarenakan beroperasinya koridor 13 (Ciledug – Blok M), penambahan rute-rute baru, dan pelayanan Transjakarta secara gratis. Pelayanan Transjakarta gratis sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat dengan kategori sebagai berikut :

1) PNS dan pensiunan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2) Tenaga kontrak yang bekerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3) Peserta didik penerima KJP
4) Karyawan swasta tertentu
5) Penghuni rumah susun sederhana sewa
6) Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7) Penerima beras keluarga sejahtera yang berdomisili di Jadebotabek
8) Anggota TNI / Polri
9) Veteran Republik Indonesia
10) Penyandang disaibilitas
11) Penduduk DKI lanjut usia

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja Jumlah Penumpang busway perhari pada tahun 2016 sebanyak 310.038 pnp/hari atau sebesar 36,48 persen, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target

sebanyak 506.000pnp/hari telah mencapai capaian sebanyak 385.185 pnp/hari atau sebesar 76,12 persen.

Tabel III.39
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Penumpang busway perhari	850.000 pnp/hari	310.038 pnp/hari	36,48%	506.000 pnp/hari	385.185 pnp/hari	76,12%

Sumber : Dinas Perhubungan

Peningkatan hasil capaian penumpang Transjakarta tahun 2017 dari tahuntahun sebelumnya tidak mencapai target, banyak faktor yang melandasi tidak tercapainya target tersebut, namun dapat dikerucutkan kedalam 2 (dua) faktor utama, yaitu sebagai berikut :

- Pengguna angkutan umum saat ini merupakan kelompok *captive*, kelompok *captive* adalah kelompok yang tergantung terhadap angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya, artinya tidak ada pilihan lain untuk melakukan perjalanan kecuali dengan menggunakan angkutan umum. Hal ini didorong karena tidak dimilikinya kendaraan pribadi atau memiliki kendaraan pribadi tetapi tidak bisa mengendarainya
- Kurang efektifnya *shifting* / beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, kelompok *choice* memiliki peran utama dalam hal ini, kelompok ini mampu menentukan pilihan mereka dalam memilih moda transportasi antara kendaraan pribadi dan angkutan umum. Alasan kenapa masih menggunakan kendaraan pribadi karena ketersediaan sarana dan prasarana, ketepatan waktu, kenyamanan, fleksibelitas, biaya operasional perjalanan lebih murah dan lain-lain.

Ketersediaan sarana dan prasarana Transjakarta untuk melayani masyarakat pengguna angkutan umum merupakan wewenang dari PT Transjakarta. Sejak Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta, seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Unit Pengelola Transjakarta Busway untuk penyelenggaraan sistem BRT dialihkan kepada PT Transjakarta. Salah satu bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan

adalah bis. Jumlah kebutuhan bis di akhir tahun 2017 dalam RPJMD maupun Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah 1289 setara Articulated Bus untuk menunjang target 1.000.000 penumpang / hari, sedangkan realisasi bus yang ada dan beroperasi di awal tahun 2017 sebanyak 476 setara Articulated Bus (179 Articulated Bus dan 594 Single Bus), terdapat kekurangan sebanyak 813 setara Articulated Bus.

Dari segi kenyamanan dan keamanan Transjakarta, terdapat kegiatan survei capaian SPM Transjakarta yang merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perhubungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Transjakarta guna menentukan besaran *Public Service Obligation* (PSO) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD yang membidangi urusan pengelolaan dan penyelenggaraan angkutan umum atas pelayanan yang diberikan masyarakat. Tujuan digunakannya SPM sebagai tolok ukur capaian indikator kinerja adalah bahwa dengan terpenuhinya SPM maka diharapkan dapat menarik masyarakat menjadi pengguna Transjakarta dengan aman dan nyaman, sehingga dapat dapat meningkatkan jumlah penumpang Transjakarta. Rata-rata hasil pencapaian SPM Transjakarta setiap triwulan di tahun 2017 berada pada nilai 85% - 95%.

Sistem pengendalian lalu lintas dengan ERP masih dalam tahap proses lelang, sedangkan pengembangan layanan angkutan umum seperti LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan MRT sebagai penunjang integrasi dengan sistem BRT Transjakarta masih dalam proses pengerjaan fisik. Kebijakan OK Otrip dalam integrasi angkutan umum berbasis jalan dengan pelayanan Transjakarta disertai keterjangkauan tarif dan kemudahan akses masih dalam proses tahap uji coba.

Sepanjang Tahun 2017 terdapat sejumlah titik pembangunan pada ruas jalan utama yang bersinggungan dengan koridor busway. Pembangunan tersebut memberi dampak terhadap kecepatan perjalanan (kemacetan) terutama Transjakarta sehingga mempengaruhi nilai *headway*. Pengaruh tersebut memberi dampak terhadap ketepatan waktu tiba dan sampai di tujuan, sedangkan masyarakat membutuhkan kepastian waktu untuk sampai ke

lokasi tujuan karena tujuan bekerja ataupun sekolah. Beberapa titik pembangunan diantaranya: pembangunan LRT Jabodebek, pembangunan LRT Jakarta, pembangunan MRT, pembangunan *fly over* Pancoran, pembangunan *underpass* Kuningan, dan lain-lain

12. MENINGKATNYA RUANG BAGI SEKTOR INFORMAL PADA KAWASAN PERKANTORAN, PERDAGANGAN DAN PERMUKIMAN

Sasaran Strategis "Meningkatnya ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran, perdagangan dan permukiman" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m^2) di lokasi binaan dan lokasi sementara" dengan target capaian 20 persen.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.40
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m^2) di lokasi binaan dan lokasi sementara	20%	Program peningkatan sarana dan prasarana Koperasi dan UMKM

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015, lokasi sementara PKL adalah Prasarana dan Sarana dan Utilitas Umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan areal kewilayahan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Penetapan Lokasi PKL dilakukan oleh Walikota/Bupati atas nama Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi serta Kepala Dinas KUKM serta Perdagangan.

Untuk mencapai target tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.41
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m^2) di lokasi binaan dan lokasi sementara					
1.	Program peningkatan sarana dan prasarana Koperasi dan UMKM	Pengadaan Sarana Dagang bagi PKL	5,996,479,965	3,719,710,500	62.03%
		Pengadaan sarana dan prasarana Co Working Space	983,876,204	603,905,882	61.38%
		Pembangunan Pujasera UMKM di Pulau Tidung	-	-	-
		Pembangunan Pujasera UMKM di Pulau Untung Jawa	-	-	-
		Pemeliharaan Gedung Pusat Promosi Johar Baru	341,900,906	232,848,792	68.10%
		Pemeliharaan Gedung Pusat Provinsi PPIKM	291,093,995	184,589,813	63.41%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 4.741.054.987 atau sebesar Rp. 7.613.351.070 dari 6 (enam) kegiatan yang direncanakan di APBDP 2017. Kegiatan yang dimatikan adalah Pembangunan Pujasera UMKM di Pulau Tidung dan Pembangunan Pujasera di Pulau Untung Jawa, kedua kegiatan tersebut dimatikan karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menganggarkan kegiatan dengan sasaran yang sama.

Pada tahun 2017 luas ruang untuk pedagang kaki lima di lokasi binaan dan lokasi sementara mencapai 170.726 m^2 meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 167.799 m^2. Kenaikan luas ruang ini dikarenakan adanya penambahan luas ruang PKL di Lokbin Kota Intan (Kawasan Kota Tua) dan Lokbin Kamal. Namun kenaikan tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, dimana dari 20% target kenaikan hanya terealisasi sebesar 1.46% atau dengan kata lain capaian hanya sebesar 7,28%. hal ini disebabkan Lokbin Semper dan Lokbin Rawa Buaya yang dijadikan rumah susun serta beberapa titik lokasi sementara di Jakarta Timur yang dihapus

untuk dikembalikan fungsinya menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan SK Walikota Jakarta Timur Nomor 143 Tahun 2017.

Tabel III.42
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m^2) di lokasi binaan dan lokasi sementara	20%	4.70%	23.51%	20%	1.46%	7.28%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan

Dalam rangka penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan luas ruang untuk pedagan kaki lima (m^2) di lokasi binaan dan lokasi sementara dengan melaksanakan beberapa kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM.

13. MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN

Sasaran Strategis "Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media" dengan target capaian sebanyak 75 persen.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.43
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media	75%	Program Komunikasi Data dan Informasi Publik

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.44
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media					
1.	Program Komunikasi Data dan Informasi publik	Pengelolaan Respon Opini Publik	2,609,686,630	1,734,680,000	**66.47%**

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pengelolan Respon Opini Publik merupakan sarana yang diharapkan mampu membentuk opini publik dalam mengimplementasikan program, kegiatan dan kebijakan guna memperluas pemahaman dan dukungan publik, dengan demikian konsep kota cerdas dalam pengelolaan aspirasi publik menjadi unsur penting bagi pemerintahan yang efektif dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada publik serta memiliki peran asistensi terhadap menajemen pemerintahan dengan menyediakan alternatif penyelesaian permasalahan, menjadi fasilitator dengan masyarakat penerima layanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi, memilki pagu anggaran sebesar Rp.2.609.686.630 dengan realisasi sebesar Rp.1.734.680.000,- presentase 68,73% dan memiliki sisa anggaran Rp.816.106.630,-

Kegiatan yang dilakukan pada respon opini publik, antara lain:

a. Pengelolaan kanal resmi pengaduan Pemprov DKI Jakarta meliputi Balai Warga website jakarta.go.id, email.jakarta.go.id, Facebook Pemprov DKI Jakarta, Kliping Media, Media News Online, SMS center Pemprov DKI Jakarta, Twitter Pemprov DKI Jakarta, Integrasi Pengaduan di tingkat kecamatan.
b. Pengelolaan pengaduan dan aspirasi warga melalui aplikasi Qlue
c. Berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui kanal aduan Lapor!5P4N yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

Hasil dari kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Jumlah aspirasi yang disampaikan melalu **kanal resmi Pemprov DKI Jakarta** sebanyak **6.078 laporan** dan melalui **Qlue** sebanyak **235.447 laporan serta Lapor ! SP4N** sebanyak **4.034 laporan** dengan total **245.559 laporan** selama tahun 2017.

b. Hasil rata-rata dari respon terhadap pengaduan dan aspirasi yang masuk sebesar 89%

c. Saluran **pengaduan resmi** Pemprov DKI Jakarta, dengan presentase tindak lanjut 15% (**905 laporan**) dan tindak lanjut lapor! 5P4N 21% (**859 laporan**)sebagai berikut.

Tabel III.45
Jumlah laporan dari media sosial

	Bulan ke-												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Media News Online	23	42	11	5	3	1	7	3	0	3	0	0	**98**
Twitter	160	137	150	64	67	53	62	85	44	28	110	69	**1,029**
Facebook	58	42	45	32	47	18	68	43	7	17	74	28	**479**
SMS Center	37	31	38	44	29	10	32	37	23	15	54	16	**366**
Email	117	93	86	35	51	41	76	133	28	19	133	49	**861**
Klipping Media	248	232	275	123	227	145	134	249	94	90	0	0	**1,817**
Balai Warga	11	13	10	12	8	3	5	7	5	4	11	3	**92**
Pengaduan Tk. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409	927	**1,336**
Total	**654**	**590**	**615**	**315**	**432**	**271**	**384**	**557**	**201**	**176**	**791**	**1,092**	
Lapor! SP4N	162	290	371	368	395	271	384	557	201	176	791	1,092	**6,078**
Tindak Lanjut ROP	144	112	123	47	51	46	42	33	12	24	126	145	**905**
Tindak Lanjut Lapor! SP4N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**859**

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

d. Saluran pengaduan masyarakat melalui Kanal Qlue per bulan masing-masing wilayah pada tahun 2017, antara lain :

Tabel III.46
Jumlah laporan melalui media Qlue masing-masing wilayah

Bulan	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Utara	Total
Jan	8,130	2,865	4,083	4,411	3,331	22,820
Feb	11,100	3,792	5,603	5,091	3,581	29,167
Mar	11,198	4,137	6,191	5,618	4,086	31,230
Apr	9,123	3,233	5,206	5,203	2,817	25,582

Bulan	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Utara	Total
May	6,021	2,220	4,869	3,613	1,150	17,873
Jun	6,496	2,209	4,287	2,103	1,171	16,266
Jul	6,940	2,212	3,040	2,669	1,899	16,760
Aug	7,758	3,039	3,031	2,592	2,040	18,460
Sep	7,717	2,855	2,936	2,840	1,748	18,096
Oct	5,600	2,617	3,742	2,430	1,640	16,029
Nov	3,547	2,227	2,968	2,396	1,267	12,405
Des	3,133	1,671	2,565	2,311	1,079	10,759
Total	**86,763**	**33,077**	**48,521**	**41,277**	**25,809**	**235,447**

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

e. Jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui Kanal Qlue Per Bulan Berdasarkan Status Laporan (Presentase TL Adalah Hasil Jumlah Dari Proses Sampai Selesai Dibagi Total Laporan), dengan presentase tindak lanjut 92% (**217.516 laporan**) Berikut hasil pengaduan masyarakat pada tahun 2017, antara lain:

Tabel III.47
Jumlah laporan melalui media Qlue berdasarkan status laporan

Bulan	Wait	Process	Disposisi	Coordination	Complete	Total	% TL
Jan	1305	5239	0	0	16276	22820	**94%**
Feb	4219	1652	0	534	22762	29167	**86%**
Mar	4343	3022	0	644	23221	31230	**86%**
Apr	2044	5547	0	559	17432	25582	**92%**
May	1494	3623	0	306	12450	17873	**92%**
Jun	1957	3719	0	327	10263	16266	**88%**
Jul	1953	4459	0	323	10025	16760	**88%**
Aug	815	4427	0	1671	11547	18460	**96%**
Sep	726	2735	325	2928	11382	18096	**96%**
Okt	711	1725	162	2828	10603	16029	**96%**
Nov	726	1720	148	2714	7097	12405	**94%**
Des	858	1385	66	2188	6262	10759	**92%**
Total	21151	39253	701	15022	159320	235447	**92%**
%	**9%**	**17%**	**0%**	**6%**	**68%**	**100%**	**92%**

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media pada tahun 2016 sebanyak 81 persen laporan atau mencapai 112.50 persen dari target yang ditetapkan, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target sebesar 75 persen telah mencapai capaian sebanyak 89 persen atau sebesar 118.67 persen dari target.

Tabel III.48
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media	72%	81%	112.50%	75%	89%	118.67%

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Berikut beberapa kendala yang ada dalam mencapai target capaian indikator, sebagai berikut :

a. Masih kurangnya perhatian dari SKPD terhadap aspirasi yang masuk.
b. Adanya aspirasi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga membutuhkan waktu dalam melakukan tindak lanjut.
c. Terbatasnya aparatur untuk menindaklanjuti aspirasi warga.
d. Untuk membantu keterbatasan aparatur dibutuhkan tenaga ahli namun memerlukan biaya.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka solusi yang dapat dilakukan dimasa mendatang antara lain :

a. Melakukan Bimbingan Teknis dan Sosialiasi kepada SKPD mengenai aplikasi pengaduan dan aspirasi warga;
b. Mendorong SKPD untuk menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pimpinan;
c. Mendorong SKPD untuk memanfaatkan data pengaduan dan aspirasi warga yang masuk sebagai dasar; dan
d. pengambilan kebijakan.

14. BERKURANGNYA TINGKAT RISIKO/EFEK NEGATIF AKIBAT KEBAKARAN

Sasaran Strategis "Berkurangnya tingkat risiko/efek negatif akibat kebakaran" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Tingkat waktu tanggap kebakaran (respon time) 15 menit" dengan target capaian selama 15 menit.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.49
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Tingkat waktu tanggap kebakaran (respone time) 15 menit	15 menit	Program Penanggulangan Kebakaran
2			

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk mencapai target tersebut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.50
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Tingkat waktu tanggap kebakaran (respone time) 15 menit					
1.	Program penanggulangan kebakaran	Gladi Gabungan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Tinggi, Industri, Mall dan Obyek Vital	56.251.800	21.420.000	38%
		Antisipasi penjagaan hari Raya Keagamaan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	28.576.000	13.120.000	46%
		Perawatan/Pemeliharaan Alat Pemancar, Alat Komunikasi Radio dan Antena Tower	785.504.467	290.510.794	37%
		Perawatan Perangkat Command Center	153.161.800	34.641.500	23%
		Penyediaan Sewa Internet untuk Command Center	100.500.000	45.500.000	45%
		Pengembangan Command Center	2.589.505.969	2.109.470.471	81%
		Pengelolaan Command Center	80.520.000	73.200.000	91%

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja tingkat waktu tanggap kebakaran *(response time)* 15 menit pada tahun 2016 sebesar 98 persen atau sebesar 120.99 persen dari target yaitu 81 persen, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target sebanyak 82 persen telah mencapai capaian sebanyak 94 persen atau sebesar 114.63 persen dari target.

Tabel III.51
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Berkurangnya tingkat resiko/efek negatif akibat kebakaran	81%	98%	120.99%	82%	94%	11.4.63%

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Berkurangnya tingkat resiko/efek negatif akibat kebakaran dapat diukur melalui penilaian prosentase tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit. Dengan tibanya unit di lokasi kejadian kebakaran dengan cepat, dapat mengurangi tingkat kerugian dan dampak negatif lainnya yang dapat ditimbulkan kejadian kebakaran. Realisasi indikator ini pada tahun 2017 tercapai sebesar 94% melebihi target yang telah ditentukan yakni 82%. Dalam mencapai target, ada beberapa kendala yang ditemui yakni :

a. Belum terciptanya koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait yang dapat menunjang terlaksanya indikator tersebut dengan baik, yakni koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Satpol PP terutama terkait pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk mempercepat petugas dalam mencapai lokasi.

b. Banyaknya warga yang memarkirkan kendaraannya di jalan umum, sehingga mempersulit akses unit petugas dalam mencapai lokasi dengan cepat.

15. MENINGKATNYA PELAYANAN PAJAK DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sasaran Strategis "Meningkatnya Investasi Daerah yang Berkualitas dan Selektif untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Lebih Efisien, Efektif

dan Inklusif dengan tetap Menggunakan Prinsip *Good Governance*" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Jumlah Wajib Pajak yang Transaksinya dapat dimonitor secara online" dengan target capaian sebanyak 10.237 wajib pajak.

Tabel III.52
Target Capaian

No	Indikator	Program		Kegiatan	Target
1	Jumlah Wajib Pajak yang Transaksinya dapat dimonitor secara online	Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah	1	Pengembangan Aplikasi Konsolidasi data pajak	10.237 wp
			2	Maintenance Online Sistem	
			3	Pengembangan Intrastruktur Teknologi Online Sistem Pajak Daerah	

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan data diatas capaian indikator kinerja tersebut dapat tercapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan serta meningkat pada tahun sebelumnya.

Tabel III.53
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator	Target Th 2017	Realisasi Th 2017	Capaian 2016	Capaian 2017
1	Jumlah Wajib Pajak yang Transaksinya dapat dimonitor secara online	10.237 wp	10.237 wp	38,96%	100%

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan/atau retribusi merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang dibebankan seluruh rakyat Indonesia, baik secara pribadi seseorang maupun badan hukum atau badan lainnya yang bersifat memaksa. Secara hukum perbuatan tersebut diatas merupakan tindakan yang legal atau sah bagi negara untuk memaksa setiap masyarakat atau badan hukum melakukan kontribusi wajib yang bersifat memaksa tersebut, sebagaimana

diatur dan ditegaskan dalam Konstitusi Republik Indonesia dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"

Sehingga secara hukum sangat jelas jika pajak merupakan suatu hal yang mutlak dan memiliki kedudukan secara konstitusional, yaitu sebagai bagian dari upaya negara untuk menjalankan roda pemerintahan khususnya dibidang perekonomian. Penggolongan jenis pajak berdasarkan kelembagaan pemungutannya dibagi menjadi 2 (dua), Pertama Pajak Negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan, lalu Kedua Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan Daerah atau lembaga lain yang tugas dan fungsinya mengelola perpajakan yang ada di daerah, untuk di DKI Jakarta dikelola oleh suatu badan yang bernama Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta ("BPRD DKI Jakarta").

- Pajak Negara

  Pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan Republik Indonesia adalah :
  - Pajak Penghasilan/PPh (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)
  - Pajak Pertambahan Nilai/PPn (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)
  - Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)
  - Bea Materai (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985)

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
  - Pajak Provinsi :
    - Pajak Kendaraan Bermotor
    - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    - Pajak Rokok;
  - Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Air Tanah
- Pajak Perparkiran
- Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun2010 tentang Pajak Hotel; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahuri 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; Peraturari Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan; Peraturar. Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, setidaknya ada 2 (dua) Peraturan Gubernur yang mengamanatkan pengawasan pajak melalui mekanisme elektronik (online) menggunakan sistem teknologi informasi. Pelaporan transaksi yang dimaksud adalah transaksi penjualan dan transaksi pembayaran. Kedua peraturan gubernur tersebut antara lain :

a. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System.

b. Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Pajak Secara Elektronik.

Peraturan Gubernur tersebut pertama diatas mengatur obyek pajak daerah terbatas hanya pada 4 (empat) jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dengan mekanisme online sistem sementara Peraturan Gubernur tersebut kedua diatas mengatur tentang mekanisme pembayaran pajak dan validasi pembayaran tersebut atas semua jenis objek pajak daerah provinsi DKI Jakarta.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012, proses pelaksanaan pemungutan pajak dan pengawasannya dilaksanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui sistem online. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 yang berbunyi :

Pasal 2 ayat (1)

"Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala DPP (BPRD) berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh DPP secara online."

Pasal 3 ayat (1)

"*Online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh DPP dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha."

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012, maka dapat ditarik kesimpulan jika Badan Pajak dan Retribusi dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk secara langsung melakukan monitor atau pengawasan terhadap pelaporan data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dan berwenang membuat suatu mekanisme elektronik berbasis teknologi informasi untuk memantau transaksi pelaporan dan juga pembayaran secara *realtime* dan online. Ada beberapa faktor yang menyebabkan BPRD DKI Jakarta selaku fiskus harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah :

a. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, karena seringkali pelaku usaha tidak mau terbuka jika ada hal-hal yang berkaitan dengan omzet dan kegiatan

pelaporan data transaksi usaha, yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak menjadi tidak optimal.

b. Banyak tuntutan masyarakat agar Pemerintah secara optimal menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), ditinjau dari segi transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemungutan pajak yang ada.

c. Adanya rasa sensitivitas yang cukup tinggi dari pelaku usaha selaku wajib pajak kepada Pemerintah yang kaitannya dengan kerahasiaan sistem administrasi usahanya, sehingga Pemerintah harus betul betul menjamin kerahasiaan data transaksi usaha hanya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/Gubernur DKI Jakarta.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Pajak Secara Elektronik diamanatkan bahwa pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan secara elektronik memanfaatkan teknologi dan informasi serta melakukan sinergi antar beberapa instansi/lembaga terkait antara lain : Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Bank/Non Bank Persepsi Penerima dan Bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Fungsi dari setiap lembaga/instansi/Perangkat Daerah tersebut masing-masing diatur dalam perda/pergub tata kelola serta tugas pokok dan fungsi nya. Secara khusus dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah ini lembaga/instansi/unit/Perangkat Daerah tersebut memiliki keterkaitan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pihak yang menentukan nilai/besaran ketetapan pajak daerah dan sebagai unit yang bertanggung jawab memastikan pembayaran pajak dan retribusi sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran.

b. Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pihak yang melakukan validasi pembayaran antara wajib pajak memalui bank penerima pembayaran sampai dipastikan masuk kedalam Bank RKUD sesuai dengan pos masuk dan besaran yang ditentukan.

c. Bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) adalah bank kas umum daerah sebagai tempat rekening penampungan terakhir pendapatan asli daerah.

d. Bank/Non Bank Persepsi Penerima adalah Bank yang diberikan hak oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui perjanjian kerjasama untuk menerima pembayaran pajak dan / atau retribusi daerah dari wajib pajak.
e. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai unit yang berwenang menyiapkan infrastruktur teknologi informasi berupa hardware/software/aplikasi dan yang wajib bersinergi dengan unit pengelola IT dimasing-masing pihak diatas untuk memastikan jalannya proses transaksi pelaporan dan pembayaran pajak dan / atau retribusi daerah.

Semua proses transaksi pelaporan dan pembayaran pajak dan / atau retribusi daerah tersebut harus dapat dimonitor secara otomatis melalui sistem, sehingga diharapkan tidak ada lagi pertemuan-pertemuan petugas dengan wajib pajak yang dapat menimbulkan persepsi negatif dimasyarakat dan prinsip akuntabilitas dan transparansi birokarasi dapat terwujud.

Untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan, Bidang Teknologi Informasi mempunyai beberapa kegiatan yang dibiayai dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan data diatas capaian yang awalnya pada tahun sebelumnya hanya mencapai 38, 96%, pada tahun 2017 mencapai 100%. adapun untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program pada indikator tersebut mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.750.299.800,-.

Tabel III.54
Target Realisasi Capaian Anggaran

No.	Kegiatan		Pagu	Realisasi	%	Keterangan
1	Pengembangan aplikasi konsolidasi data pajak					
	a.	Analisa Ujicoba Pemeriksaan Pajak Parkir Berbasis Gate Parkir	13.750.000	-	0,00%	Ujicoba Parkir dikerjakan dengan kerjasama System integrator AINO, Bank Mandiri dan Bank DKI serta Operator Parkir CentrePark. Sehingga tdk

No.		Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Keterangan
						diperlukan pembiayaan
	b.	Interoperabilitas Sistem Kinerja DPP Dengan Sistem Kinerja BKD	285.000.000	-	0,00%	Sistem Kinerja karena belum ada keputusan terkait dengan TKD bagi pegawai BPRD
	c.	Pembangunan Sistem Informasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Nomor Objek Dan Ketetapan	812.400.000	591.600.000	72,82%	
	d.	Penyesuaian Aplikasi Pelayanan Pajak terhadap Perubahan Struktur Organisasi Pajak Daerah	1.164.000.000	558.060.000	47,94%	
2.	Maintenance Online System		2.700.000.000	1.700.000.072	62,96%	
3.	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Online system Pajak Daerah					
	a.	Pengadaan UPS Ruang server	356.397.800	336.875.000	94,52%	
	b.	Pengadaan A TS Oracle database 12c dan A TS Oracle Spatial	5.218.752.000	5.092.756.416	97,59%	

No.		Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Keterangan
		& Graph dan Pengadaan Real Application Cluster				

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Berikut output dari kegiatan tersebut :

a. Pengembangan Aplikasi konsolidasi data pajak

Output :

- Terlaksananya pengembangan aplikasi konsolidasi data pajak

Hasil yang dicapai:

- Terlaksananya aplikasi yang sesuai dengan kaidah, pedoman dan peraturan yang berlaku.

b. *Maintenance Online System*

Output :

- Terlaksananya *Maintenance Online System*

Hasil yang dicapai :

- Terpeliharanya perangkat online sistem pajak daerah (e-Pos) dan tingkat penggunaan aplikasi disisi Wajib Pajak.

c. Pengembangan Infrastruktur Teknologi *Online System* Pajak Daerah

Output :

- Terlaksananya pengembangan Infrastruktur Teknologi *Online System* Pajak Daerah.

Hasil yang dicapai :

- Tersedianya perangkat keras/lunak teknologi informasi pajak daerah dan panduan penggunaan perangkat keras dan lunak tersebut.

16. MENINGKATNYA INTENSITAS DAN INOVASI PROMOSI PARIWISATA

Sasaran Strategis "Meningkatnya intensitas dan inovasi promosi pariwisata" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 2 (dua) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan target sebanyak 2.485.864 orang wisatawan.

b. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dengan target capaian sebanyak 31.435.592 orang wisatawan.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.55
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	2.485.864 orang	Program pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	31.435.592 orang	Program pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pariwisata di pelbagai negara saat ini menjadi ikon industri yang perkembangannya sangat pesat. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kemampuan penunjang pariwisata yang bergantung kepada kemampuan inovasi teknologi. Penggabungan industri pariwisata dan kemampuan inovasi teknologi menjadi hal yang utama. Seperti contoh pemesanan tiket secara on line mempermudah orang-orang pergi wisata dengan memilih maskapai penerbangan favoritnya yang menawarkan tiket dengan harga terjangkau dan juga pelayanan yang prima. Begitu juga kemudahan informasi yang dapat diakses melalui internet, memudahkan orang untuk mencari destinasi mana yang akan dikunjungi. Penggunaan teknologi informasi dalam promosi pariwisata sudah merupakan kelaziman yang dilakukan oleh hampir semua agen perjalanan (*travel*) dan *stacholder* pariwisata, termasuk oleh Dinas pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Peningkatan intensitas dan inovasi promosi pariwisata ini juga dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melalui pengembangan jejaring sosial, kerjasama dengan jurnalis nasional dan internasional dalam bentuk kegiatan Familiarziation Trip, serta kerjasama dengan komunitas pariwisata dan kebudayaan dalam bentuk penyelenggaraan event-event nasional dan internasional, kerjasama dengan kedutaan negara asing di Jakarta dalam kegiatan keikutsertaan pada promosi pariwisata dan kebudayaan di luar negeri, begitu juga kerjasama dengan pihak swasta (pusat-pusat perbelanjan), lembaga-lembaga pariwisata dan lain-lain.

Upaya dalam meningkatkan intesitas dan inovasi pariwisata bertujuan untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maunpun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Jakarta. Hal tersebut menjadi indikator kinerja Pemerintan Provinsi DKI Jakarta dan masuk dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017.

Untuk mencapai target tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai beberapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.56
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara					
1.	Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	Jakarta Museums of Social Media Competitions	499.906.722	440.375.000	88,09
		Penyelenggaraan Familiarizations Trip	1.821.906.350	1.010.641.251	55,47
		Pengadaan bahan dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Kemitraan Pariwisata (Asosiasi Pariwisata Internasional)	506.839.080	4.499.550	0,89
		Pengadaan Bahan dan Fasilitas Pendukung Promosi Pariwisata dan Kebudayaan di Luar Negeri	2.452.806.000	653.427.436	26,64
		Pengelolaan dan Pengembangan Website Resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta-tourism.go.id)	308.697.000	292.566.000	94,77
		Sewa Colocation Aplikasi Server Website www.jakarta-tourism.go.id dan Aplikasi Mobile Enjoy Jakarta	225.482.400	225.060.000	99,81
jumlah kunjungan wisatawan nusantara					
1.	Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	Pengadaan Bahan dan Fasilitas Pendukung Promosi Pariwisata dan Kebudayaan di Dalam Negeri	826.133.000	654.903.500	79,27
		Sewa Tempat Pelayanan Informasi Pariwisata dan Budaya	444.224.000	255.024.000	57,41

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		Jakarta dan Sewa Tempat Papan Display Petunjuk Informasi Pariwisata dan Budaya di TIC Djakarta Theater			

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan data diatas bahwa sasaran strategis meningkatnya intensitas dan inovasi promosi pariwisata adalah :

a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, target tahun 2017 sebanyak 2.485.864 orang dan teralisasi sebanyak 2.658.055 orang atau 106.92%.

b. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara mempunyai target tahun 2017 sebanyak 31.435.592 orang dan terealisasi sebanyak 35.464.572 orang atau 112.81%.

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp 7.085.994.552,- terealisasi sebesar Rp 3.536.496.737,- (49,91%) dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan.

Perbandingan realisasi meningkatnya Intensitas dan Inovasi Promosi Pariwisata (IKU) tahun 2017 dengan realisasi tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.57
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kunjungan wisatawan manca negara	2.800.000 orang	2.512.005 orang	89,71	2.485.864 orang	2.658.055 Orang	106,92
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	32.000.000 orang	31.645.333 orang	98,89	31.435.592 Orang	35.464.572 Orang	112,81

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 target capaian jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara rata-rata hanya mencapai 94,30%, tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara telah mencapai target dengan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan sebesar 109%. Hal ini menggambarkan bahwa Jakarta merupakan destinasi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi.

17. MENINGKATYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA SEMUA LAPISAN MASYARAKAT

Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu" dengan target capaian sebesar 99 persen.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.58
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	99%	Peningkatan kualitas pelayanan publik
2			

Sumber : Dinas PM dan PTSP

Untuk mencapai target tersebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai beberapapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.59
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu					
1.	Peningkatan Kualitas	Bimbingan teknis regulasi teknis PTSP	241,344,000	207,352,750	85.92

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Pelayanan Publik	Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	425,504,600	299,611,500	70.41
		Pelaksanaan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	14,448,720,000	12,604,224,545	87.23
		Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	554,940,000	517,350,000	93.23
		Pelaksanaan dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	10,572,256,000	10,531,986,752	99.62
		Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis	25,045,179,677	26,894,760,552	107.38
		Pengembangan Call Center dan Komunikasi Masyarakat	6,037,944,077	5,544,317,150	91.82
		Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pelayanan PTSP	85,463,000	85,463,000	100.00
		Pengelolaan dan Pengembangan Survey Kepuasaan Masyarakat	284,763,000	271,500,000	95.34
		Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan	276,126,000	113,400,000	41.07
		Peningkatan Kualitas Ruang Pelayanan PTSP	14,011,005,000	-	-
		Pengelolaan dan Peningkatan	15,803,718,000	15,531,998,875	98.28

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			

Sumber : Dinas PM dan PTSP

Adapun capaian dari kegiatan-kegiatan diatas dapat dijabarkan pelaksanaannya yaitu :

a. Tercapainya SDM yang berkualitas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
b. Tercapainya pengembangan pelayanan Perizinan dan non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
c. Tercapainya hasil dari penelitian dan uji fisik terhadap permohonan perizinan dan non perizinan berupa rekomendasi teknis
d. Terkelolanya pengelolaan pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
e. Meningkatnya pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan

Untuk perizinan elektronik di DPMPTSP dengan menggunakan website http://pelayanan.jakarta.go.id sampai dengan Tahun 2017 berjumlah 216 jenis layanan dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini. Jumlah perizinan yang sudah elektronik sampai dengan bulan Januari tahun 2017 berjumlah 60 perizinan. Sepanjang tahun 2017, Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan telah merilis perizinan elektronik sebanyak 156 perizinan. Di bulan Januari tahun 2017, untuk perizinan pada Bidang Pariwisata sudah seluruhnya dilakukan secara elektronik.

Tabel III.60
Jenis perizinan yang sudah online

No	Jenis Perizinan yang Sudah Online	Dasar Pelaksanaan	Keterangan
		Januari	
61	Tanda Daftar Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami/Buatan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
62	Tanda Daftar Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
63	Tanda Daftar Pengelolaan Museum	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
64	Tanda Daftar Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id

No	Jenis Perizinan yang Sudah Online	Dasar Pelaksanaan	Keterangan
65	Tanda Daftar Pengelolaan Objek Ziarah	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
66	Tanda Daftar Kawasan Pariwisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
67	Tanda Daftar Angkutan Kereta Api Wisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
68	Tanda Daftar Angkutan Sungai dan Danau Wisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
69	Tanda Daftar Angkutan Laut Domestik Wisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
70	Tanda Daftar Angkutan Laut Internasional Wisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
71	Tanda Daftar Restoran Bergerak (Mobile Restaurant/Food Truck)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
72	Tanda Daftar Restoran Terapung	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
73	Tanda Daftar Bumi Perkemahan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
74	Tanda Daftar Pondok Wisata (Cottage)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
75	Tanda Daftar Hotel Terapung	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
76	Tanda Daftar Resort Wisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
77	Tanda Daftar Hunian Wisata (Service Apartement)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
78	Tanda Daftar Penginapan Remaja (Graha Wisata)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
79	Tanda Daftar Wisma	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
80	Tanda Daftar Kolam Pemancingan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
81	Tanda Daftar Sanggar Seni	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
82	Tanda Daftar Galeri Seni	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
83	Tanda Daftar Gedung Pertunjukan Seni	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
84	Tanda Daftar Bioskop	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
85	Tanda Daftar Permainan Ketangkasan untuk Orang Dewasa	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
86	Tanda Daftar Sarana Rekreasi Keluarga untuk Anak-anak dan Keluarga	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
87	Tanda Daftar Panti Mandi Uap	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
88	Tanda Daftar Taman Margasatwa	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
89	Tanda Daftar Taman Rekreasi	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
90	Tanda Daftar Taman Bertema	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
91	Tanda Daftar Jasa Informasi Pariwisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
92	Tanda Daftar Jasa Manajemen Hotel	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
93	Tanda Daftar Wisata Selam	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
94	Tanda Daftar Wisata Perahu Layar	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id

No	Jenis Perizinan yang Sudah Online	Dasar Pelaksanaan	Keterangan
95	Tanda Daftar Wisata Memancing	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
96	Tanda Daftar Wisata Selancar	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
97	Tanda Daftar Dermaga Bahari	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
98	Tanda Daftar Wisata Sungai, Danau atau Waduk untuk Jenis Wisata Dayung	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
		Februari	
-	-	-	-
		Maret	
99	SIUP Kecil Baru-TDP Simultan (Kecamatan)	Surat Keputusan Ka. Dinas PM & PTSP No. 23 Tahun 2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
100	TDG [Luas Tanah Maksimal 1500 m2 dan 2 Lantai] (Kecamatan)	Surat Keputusan Ka. Dinas PM & PTSP No. 23 Tahun 2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
		April	
101	Izin Riset / Penelitian (Wilayah Penelitian di 2 Kota atau lebih) dengan Tanda Tangan Elektronik	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.14/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
102	Izin Riset / Penelitian (Wilayah Penelitian di 1 Kota) dengan Tanda Tangan Elektronik	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.14/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
		Mei	
-	-	-	-
		Juni	
-	-	-	-
		Juli	
-	-	-	-
		Agustus	
103	Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
104	Rekomendasi Penguningan/Penetapan Status	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
105	Rekomendasi Penghitaman	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
106	Rekomendasi Mutasi Daerah	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
107	Rekomendasi Balik Nama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
108	Rekomendasi Peremajaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
109	Peremajaan Trayek	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
110	Kartu Pengawasan Angkutan Barang	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
111	Kartu Pengawasan Angkutan Dalam Trayek (Bus Besar)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
112	Kartu Pengawasan Angkutan Dalam Trayek (Bus Sedang)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
113	Kartu Pengawasan Angkutan Dalam Trayek (Bus Kecil)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
114	Kartu Pengawasan Angkutan Non Trayek (Taksi)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
115	Kartu Pengawasan Angkutan Non Trayek (Angkutan Kawasan Tertentu)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
116	Angka Pengenal Impor Umum (API-U)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.25/SE/2017	http://api.kemendag.go.id

No	Jenis Perizinan yang Sudah Online	Dasar Pelaksanaan	Keterangan
117	Angka Pengenal Impor Produsen (API-P)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.25/SE/2017	http://api.kemendag.go.id
118	Perpanjangan RPTKA	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.25/SE/2017	tka-daerah.kemnaker.go.id
119	Perpanjangan IMTA	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.25/SE/2017	tka-daerah.kemnaker.go.id
		September	
120	Rekomendasi Pindah Alamat	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
121	Kartu Pengawasan Angkutan Non Trayek (Mobil Belajar)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
122	Kartu Pengawasan Angkutan Barang (Mobil Besar Trailer)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
123	Kartu Pengawasan Angkutan Barang (Mobil Derek/Towing)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
124	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090 /spipise/
125	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090 /spipise/
126	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090 /spipise/
127	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090 /spipise/
128	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090 /spipise/
129	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090 /spipise/
		Oktober	
130	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (di Fasilitas Kefarmasian)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
131	Surat Izin Praktik Apoteker	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
132	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
133	Surat Izin Praktik Fisioterapis (Praktik Perorangan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
134	Surat Izin Praktik Terapi Wicara (Praktik Perorangan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
135	Surat Izin Praktik Radiografer	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
136	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
137	Surat izin Praktik Ortotis Prostetis (Praktik Perorangan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
138	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
139	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
140	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (Praktik Perorangan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
141	Surat Izin Praktik Elektromedis	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
142	Surat Izin Praktik Perekam Medis	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
143	Surat Izin Praktik Optometris	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
144	Surat Izin Praktik Okupasi Terapi (Praktik Perorangan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
145	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id

No	Jenis Perizinan yang Sudah Online	Dasar Pelaksanaan	Keterangan
146	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
147	Penerbitan Tanda Daftar Perkumpulan Organisasi Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
148	Penerbitan Tanda Daftar Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
149	Penerbitan Izin Kegiatan Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
150	Penerbitan Izin Pendirian Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
151	Penerbitan Izin Pendirian Non Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
152	Penerbitan Izin Pendirian Pusat Santunan Dalam Keluarga	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
153	Penerbitan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
154	Penerbitan Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
155	Perubahan Tanda Daftar Perkumpulan Organisasi Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
156	Perubahan Tanda Daftar Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
157	Perubahan Izin Kegiatan Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
158	Perubahan Izin Pendirian Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
159	Perubahan Izin Pendirian Non Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
160	Perubahan Izin Pendirian Pusat Santunan Dalam Keluarga	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
161	Perubahan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
162	Perubahan Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
163	Perpanjangan Tanda Daftar Perkumpulan Organisasi Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
164	Perpanjangan Tanda Daftar Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
165	Perpanjangan Izin Kegiatan Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
166	Perpanjangan Izin Pendirian Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
167	Perpanjangan Izin Pendirian Non Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
168	Perpanjangan Izin Pendirian Pusat Santunan Dalam Keluarga	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
169	Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
170	Perpanjangan Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
171	Rekomendasi Perolehan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net

No	Jenis Perizinan yang Sudah Online	Dasar Pelaksanaan	Keterangan
172	Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
173	Rekomendasi Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
174	Rekomendasi Peralihan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
175	Rekomendasi Tanggungan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
176	Rekomendasi Pemisahan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
177	Rekomendasi Pemecahan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
178	Rekomendasi Penggabungan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
179	Rekomendasi Perolehan Hak di Atas Bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
180	Rekomendasi Penurunan Hak di Atas Bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
		November	
181	Izin Operasional RS (RS Tipe B Non Pendidikan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
182	Izin Operasional RS (RS Tipe C)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
183	Izin Operasional RS (RS Tipe D)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
184	Izin Klinik Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
185	Izin Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
186	Izin Puskesmas Kecamatan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
187	Izin Puskesmas Kelurahan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
188	Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
189	Izin Laboratorium Klinik Madya	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
190	Izin Laboratorium Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
191	Rekomendasi Laboratorium Klinik Umum Tipe Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
192	Izin Penyelenggaraan Optikal	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
193	Perpanjangan Izin Operasional RS (RS Tipe B Non Pendidikan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id

No	Jenis Perizinan yang Sudah Online	Dasar Pelaksanaan	Keterangan
194	Perpanjangan Izin Operasional RS (RS Tipe C)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
195	Perpanjangan Izin Operasional RS (RS Tipe D)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
196	Perpanjangan Izin Klinik Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
197	Perpanjangan Izin Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
198	Perpanjangan Izin Puskesmas Kecamatan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
199	Perpanjangan Izin Puskesmas Kelurahan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
200	Perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
201	Perpanjangan Izin Laboratorium Klinik Madya	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
202	Perpanjangan Izin Laboratorium Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
203	Perpanjangan Rekomendasi Laboratorium Klinik Umum Tipe Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
204	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Optikal	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
205	Perubahan Izin Operasional RS (RS Tipe B Non Pendidikan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
206	Perubahan Izin Operasional RS (RS Tipe C)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
207	Perubahan Izin Operasional RS (RS Tipe D)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
208	Perubahan Izin Klinik Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
209	Perubahan Izin Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
210	Perubahan Izin Puskesmas Kecamatan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
211	Perubahan Izin Puskesmas Kelurahan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
212	Perubahan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
213	Perubahan Izin Laboratorium Klinik Madya	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
214	Perubahan Izin Laboratorium Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
215	Perubahan Rekomendasi Laboratorium Klinik Umum Tipe Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
216	Perubahan Izin Penyelenggaraan Optikal	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
		Desember	
-	-	-	-

Grafik III.4
Perizinan Elektronik tingkat Provinsi Tahun 2017

Sumber : Dinas PM dan PTSP

Grafik III.5
Perizinan Elektronik UP PTSP Kota/Kabupaten Tahun 2017

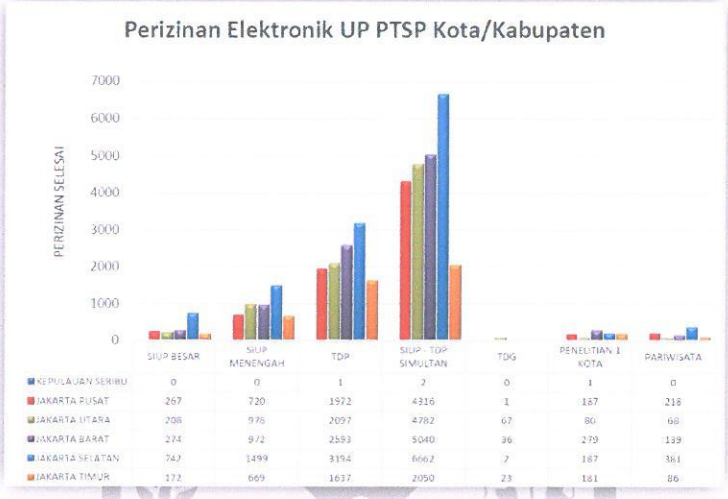

	SIUP BESAR	SIUP MENENGAH	TDP	SIUP - TDP SIMULTAN	TDG	PENELITIAN 1 KOTA	PARIWISATA
KEPULAUAN SERIBU	0	0	1	2	0	1	0
JAKARTA PUSAT	267	720	1972	4316	1	187	218
JAKARTA UTARA	208	976	2097	4782	67	80	68
JAKARTA BARAT	274	972	2593	5040	36	279	139
JAKARTA SELATAN	747	1499	3194	6662	7	187	381
JAKARTA TIMUR	172	669	1637	2050	23	181	86

Sumber : Dinas PM dan PTSP

Dilihat pada grafik di bawah, jumlah perizinan elektronik di UP PTSP Kota/Kabupaten Administrasi terdiri dari 7 (tujuh) jenis perizinan/non perizinan. Sampai dengan bulan Desember tahun 2017 tercatat sebanyak 42.783 layanan yang telah diterbitkan dengan rincian sebagai berikut, untuk Izin Penelitian 1 Kota berjumlah 915 (2%) layanan, Tanda Daftar Gudang 129 (0.3%) layanan, SIUP Besar 1.663 (4%) layanan, SIUP Menengah 4.838 (11%) layanan, SIUP-TDP simultan 22.852 (54%) layanan, Tanda Daftar Perusahaan 11.494 (27%), dan TDUP 892 (2%) layanan. SIUP-TDP Simultan menjadi layanan perizinan terbanyak dengan jumlah layanan sebanyak 22.852 (54%) layanan.

Grafik III.6
Perizinan Elektronik Kewenangan PTSP Kecamatan

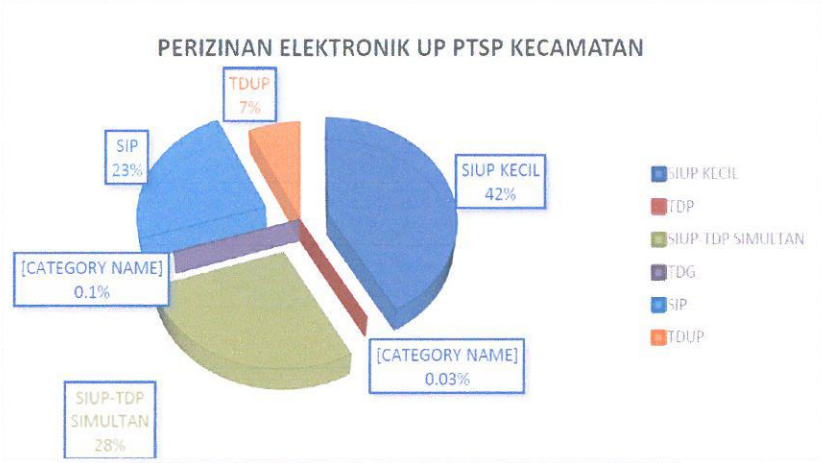

Sumber : Dinas PM dan PTSP

Layanan Elektronik pada UP PTSP Kecamatan sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 telah terselesaikan sebanyak 21.174 layanan dengan rincian SIUP Kecil 8.883 (42%) layanan, TDP 7 (0.03) layanan, SIUP-TDP Simultan 5.934 (28%) layanan, TDG 18 (0.1) layanan, SIP Dokter 4.868 (23%) layanan dan TDUP 1.464 (7%) layanan.

Grafik III.7
Perizinan Elektronik Kewenangan PTSP Kelurahan

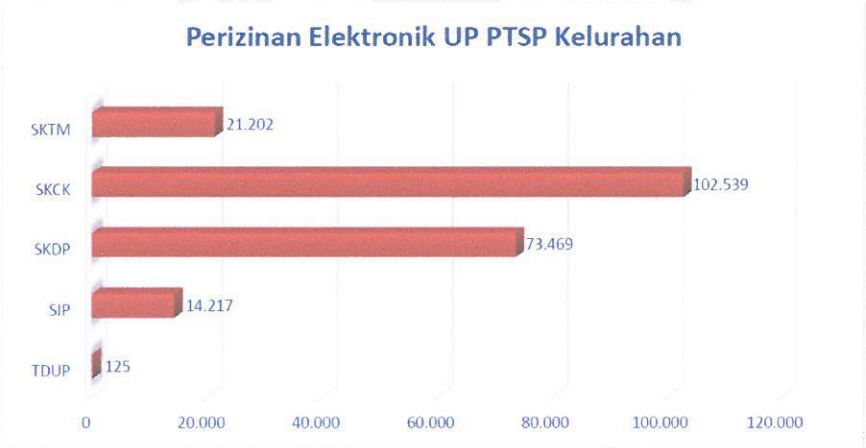

Sumber : Dinas PM dan PTSP

Jumlah perizinan elektronik UP PTSP Kelurahan yang terdiri dari 5 (lima) jenis perizinan/non perizinan sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 berjumlah 211.552 layanan yang telah diterbitkan dengan rincian untuk SIP Dokter Umum dan Dokter Gigi 14.217 layanan, SKDP 73.469 layanan, SKCK 102.539 layanan, TDUP 125 layanan dan SKTM 21.202 layanan.

Adapun realisasi capaian pada indikator kinerja Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu pada tahun 2016 seba 99 persen atau capaian sebesar 100 persen dari target, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target sebesar 99 persen telah mencapai capaian 99 persen atau sebesar 100 persen.

Tabel III.61
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	99%	99%	100%	99%	99%	100%

Sumber : Dinas PM dan PTSP

Peningkatan hasil capaian Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu tahun 2017 dari tahun ke tahun selalu mencapai target.

18. MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS SDM APARATUR YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI

Sasaran Strategis "Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Jumlah SDM Aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)" dengan target capaian sebanyak 2.000 CPNS

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.62
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Jumlah SDM aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)	2.000 CPNS	Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
2			

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

Untuk mencapai target tersebut Badan Kepegawaian Daerah mempunyai beberapapan kegiatan yaitu :

Tabel III.63
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Jumlah SDM aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)					
1.	Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II dan Guru Bantu dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	129.454.800	118.490.000,-	91,53%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

Melalui surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 528/-082.6 tanggal 15 Mei 2017 hal Usul Kebutuhan CPNS Tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan CPNS Tahun 2017 untuk mengisi kebutuhan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 47.325, dengan rincian sebagai berikut :

a. Guru : 14,001
b. Tenaga Kesehatan : 11,862
c. Jabatan Prioritas yang mendukung pembangunan Infrastruktur : 21,462

Namun, berdasarkan *press release* yang diumumkan melalui situs resmi Kemeterian PAN dan RB (www.menpan.go.id), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan penetapan formasi penerimaan CPNS Tahun 2017. Melalui data *press release* dimaksud, Kementerian PAN dan RB hanya menetapkan formasi penerimaan CPNS Tahun 2017 pada 60 Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.

Sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1398/M.PAN-RB/04/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Pengangkatan Guru Bantu Provinsi DKI Jakarta, BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan seleksi CPNS dari formasi Guru Bantu dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pendaftaran seleksi dilakukan secara online melalui website jakgov.jakarta.go.id
b. Seleksi administrasi
c. Tes Kompetensi Bidang (TKB) menggunakan CAT; dan
d. Pemberkasan

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang hasil Kelulusan Seleksi Administrasi Pengangkatan CPNS dari Guru Bantu Tahun 2015, total Guru Bantu Provinsi DKI Jakarta yang dinyatakan lulus administrasi dan harus mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan CAT adalah sebanyak 4.643 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.618 orang Guru Bantu dinyatakan tidak lulus dan harus melakukan pemberkasan sebagai tahapan akhir dari seleksi dimaksud.

Dalam prosesnya, pengangkatan Guru Bantu yang lulus seleksi menjadi CPNS akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 744 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemberkasan CPNS Formasi Guru Bantu Tahun Anggaran 2017, total Guru Bantu yang seharusnya diusulkan untuk diangkat menjadi CPNS adalah Sebanyak 1.082 orang. Namun, dari jumlah tersebut BKN hanya memberikan rekomendasi penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS terhadap 1.051 orang Guru Bantu. Perbedaan antara jumlah formasi dengan jumlah CPNS yang diangkat tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Mengundurkan diri : 1 orang
b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena ketidaksesuaian Ijazah : 4 orang
c. Tidak mengikuti pemberkasan di Dinas Pendidikan sehingga dianggap gugur : 26 orang

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator kinerja "Jumlah SDM Aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT ditahun 2017 termasuk dalam kategori "**Cukup**" dengan presentase capaian sebesar 53%. Capaian kinerja tersebut memang menurun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang sebesar 85% dengan total CPNS terangkat sebanyak 1.694 orang. Hal tersebut disebabkan karena jumlah CPNS dari formasi Guru

Bantu yang diangkat harus disesuaikan dengan jumlah formasi guru yang pensiun pada tahun 2015-2017.

Tabel III.64
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah SDM aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)	2,000	1,694	85%	2,000	1.051 CPNS	52,55%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

19. MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH YANG BERKUALITAS DAN SELEKTIF UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH YANG LEBIH EFISIEN, EFEKTIF DAN INKLUSIF DENGAN TETAP MENGGUNAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Sasaran Strategis "Meningkatnya investasi daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung perekonomian daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip good governance" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Jumlah realisasi PMA dan PMDN" dengan target capaian 55 triliun.

Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, diberbagai Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah dibentuk Satuan Tugas sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang berfungsi antara lain akan membantu mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan investasinya.

Terkait dengan implementasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri sudah menerbitkan dua peraturan baru yaitu Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Diharapkan dengan adanya dua peraturan BKPM baru tersebut akan lebih memberikan kejelasan, kepastian dan kecepatan dalam menyusun berbagai perizinan yang terkait investasi termasuk pelaporan dan pengawasannya baik di BKPM, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang tujuannya adalah agar terjadinya peningkatan minat dan juga realisasi investasi di Indonesia.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.65
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	55 triliun	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Sumber : Dinas PM dan PTSP

Untuk mencapai target tersebut Dinas PM dan PTSP mempunyai beberapan kegiatan yaitu :

Tabel III.66
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Jumlah Realisasi PMA dan PMDN					
1.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal DKI Jakarta	253,000,000	241,600,000	95.49

Sumber : Dinas PM dan PTSP

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja jumlah realisasi PMA dan PMDN pada tahun 2016 sebanyak 58.08 triliun, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut target sebanyak 55 triliun telah mencapai capaian sebanyak 108.6 triliun atau sebesar 197.45 persen.

Tabel III.67
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	-	58.08 triliun	-	55 triliun	108.6 triliun	197.45

Sumber : Dinas PM dan PTSP

Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan nilai realisasi investasi paling tinggi di Indonesia sepanjang tahun 2017. Berdasarkan data BKPM realisasi investasi di DKI Jakarta mencapai Rp 108,6 Triliun dengan rincian Rp 47,3 Triliun merupakan PMDN dan 4,6 Miliar Dollar AS atau setara Rp 61,3 Triliun. Hal tersebut membuktikan bahwa iklim investasi di DKI Jakarta semakin membaik. Pencapaian tersebut meningkat 84,7 persen dibandingkan tahun 2016. Pada saat itu jumlah realisasi PMA dan PMDN yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta adalah Rp 58,8 Triliun.

20. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KOTA

Sasaran Strategis "Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota" merupakan salah satu sasaran strategis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adapun pada sasaran tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja terkait dengan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta yaitu "Skala Indeks Demokrasi" dengan target capaian 85 poin.

Berikut program yang mendukung indikator kinerja diatas:

Tabel III.68
Program terkait indikator

No	Indikator	Target	Program
1	Skala Indeks Demokrasi	85 poin	Program Pendidikan Politik Masyarakat

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk mencapai target tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai beberapapan kegiatan-kegiatan yaitu :

Tabel III.69
Kegiatan pendukung program

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Skala Indeks Demokrasi					
1.	Program Pendidikan Politik masyarakat	1. Peningkatan kemitraan pemerintah daerah dengan partai politik	255.280.000	110.600.000	43,32%
		2. Peningkatan pemahaman	153.168.000	66.360.000	43,32%

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		undang-undang bidang politik			
		3. Peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi	153.168.000	66.360.000	43,32%
		4. Posko bersama pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	1.482.775.000	1.224.565.500	82,59%
		5. Peningkatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia	102.112.000	44.240.000	43,32%
		6. Peningkatan Kapasitas perempuan di Lembaga Politik dalam rangka kesetaraan Gender	255.280.000	117.960.000	46,21%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan data dari pelaksanaan kegiatan tersebut capaian dari indikator kinerja dengan target sebesar 85 poin mencapai realisasi sebesar 70,85 poin. Sehingga persentase capaian tersebut menurun menjadi sebesar 83,35 persen.

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja Skala Indeks Demokrasi pada tahun 2016 yaitu 85.32 poin atau sebesar 102.19 persen, namun pada tahun 2017 pada indikator tersebut mempunyai target 85 poin, sedangkan realisasi capaian 70.85 poin atau sebesar 83.35 persen.

Tabel III.70
Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Skala Indeks Demokrasi	83.49 poin	85.32 poin	102.19	85 poin	70.85 poin	83,35

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mencapai target IKU Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2017 terdapat hambatan sebagai berikut :

a. Terjadinya demo besar yang mengusung isu-isu SARA.

b. Adanya ujaran kebencian dan intoleransi dari sebagian masyarakat yang datang dari luar Jakarta serta unjuk rasa anarkistis.
c. Menurunnya hak-hak politik di Provinsi DKI Jakarta yang ditandai dengan adanya ancaman kebebasan berpendapat pada Pilkada Tahun 2017.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

a. Alokasi Persasaran Pembangunan

Pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Tabel dibawah ini disajidkan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan:

Tabel III.71
Realisasi Anggaran IKU Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

	Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				
1	Mendorong Peningkatan Predikat LKIP	Program Peningkatan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.000.000.000	2.190.900.000	**73,03%**
2	Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.101.127.092	1.420.600.000	**67,61%**
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas kesehatan masyarakat				
1	Angka kematian ibu	Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak	83,990,000	47,250,000	56.26
2	Angka kematian bayi	Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak	89,424,000	85,960,000	96.13
3	Angka Usia Harapan Hidup	Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak	117,720,000	107,060,000	90.94
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan bagi semua masyarakat				
1	Angka rata-rata lama sekolah	Program wajib belajar 12 tahun	2,388,155,717,614	2,071,339,305,950	86.73%
4	Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar kepada korban bencana				
	Respone time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Progam Tinda-kan Kedaruratan pada saat bencana dan pasca bencana	186,261,224	165,931,425	89.09
		Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan	2,855,554,544	2,717,327,535	95.16

	Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
		Informasi Pelaporan Bencana			
5	peningkatan kinerja pengelolaan persampahan				
	1 Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu	Program peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan umum	662,019,604,627	557,475,091,321	84.21%
		Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	559,024,678,731	402,790,060,616	72.05%
		Program peningkatan dan pengelolaan kantor urusan lingkungan hidup	7,810,658,415	1,259,229,770	16.12%
6	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam melakukan pengelolaan sampah				
	1 Persentase pengurangan timbunan sampah di sumber	Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber	609,129,685	518,507,650	85.12%
7	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja				
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Program Peningkatan Kesempatan kerja dan Peningkatan sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	446,592,574	422,392,773	94.58%
8	Meningkatnya Kurikulum Pelatihan Keterampilan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja				
	Persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan	Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Peningkatan Pelayan Pusat Pelatihan Kerja	108,828,400	97,606,940	89.69%

	Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
9	tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya				
1	terlaksananya pengerukan sungai	Program pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir dan drainase	37.111.756.931,-	29.005.391.856	78,16%
2	panjang pengaman pantai yang terbangun	Program pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir	82.994.590.942,-	53.784.096.519	64,80%
10	Tersedianya jaringan jalan dan trotoar dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota				
1	persentase kondisi jalan dalam kondisi baik pada jaringan jalan arteri/ kolektor sekunder	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	552.808.940.790	503.667.793.120	91,11%
2	panjang trotoar yang terbangun pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	469.994.726.701	428.242.407.792	187,27%
11	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang				
	jumlah penumpang Bus Transportasi Jakarta per Hari	Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan	2.069.192.400	1.661.477.400	80,30%
12	meningkatnya Ruang bagi sektor informal pada Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Permukiman				
	Persentase peningkatan luas ruang PKL (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara	Program peningkatan sarana dan prasarana koperasi dan UMKM	7,613,351,070	4,741,054,987	62.27%
13	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan				

	Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Jumlah aspirasi warga jakarta yang direspon dari berbagai saluran media	Program Komunikasi Data dan Informasi Publik	2,609,686,630	1,734,680,000	66.47%
14	berkurangnya tingkat risiko/efek negatif akibat kebakaran				
	tingkat waktu tanggap kebakaran (respone time) 15 menit	Penanggulangan	3,794,020,036	2,587,862,765	68.21%
15	Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi				
	jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online	Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah	2.475.150.000	1.149.660.000	46,45%
16	meningkatnya intensitas dan inovasi promosi pariwisata				
	1 jumlah kunjungan wisata mancanegara	Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	5,815,637,552	2,626,569,237	45.16%
	2 jumlah kunjungan wisata nusantara	Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	1,270,357,000	909,927,500	71.63%
17	Meningkatya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat				
	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	Peningkatan kualitas pelayanan publik	87,786,963,354	72,601,965,124	82.70
18	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi				
	Jumlah SDM Aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)	Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	129.454.800,-	118.490.000,-	91,53%
19	Meningkatnya Investasi Daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung Perekonomian Daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip Good Governance				
	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	Peningkatan Promosi dan	253,000,000	241,600,000	95.49

	Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
		Kerjasama Investasi			
20	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota				
	Skala Indeks Demokrasi	Program Pendidikan Politik masyarakat	2,401,783,000	1,630,085,500	67.87%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai capaian target Pemerintahan pada tahun 2017. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada setiap tujuan yang ditetapkan pada Keputusan Gubernur Nomor 1900 Tahun 2017 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 bisa dikategorikan Baik.

Di antara 20 (dua puluh) sasaran yang ada terdapat 11 (sebelas) sasaran yang mempunyai capaian memuaskan dan sangat baik, sehingga perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar capaian menjadi memuaskan atau sangat baik adalah :

1. Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar kepada korban bencana yang mencapai 100 persen capaian.
2. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja yang mencapai 100,02% dari target 85.02%.
3. Tersedianya jaringan jalan dan trotoar dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota yang mencapai 100.82% pada indikator panjang trotoar yang terbangun pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan yang mencapai 118.67% aspirasi warga Jakarta yang direspon.
5. Berkurangnya tingkat risiko/efek negatif akibat kebakaran yang mencapai 114.63%.
6. Tercapainya jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online yang mencapai 100%.
7. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata mancanegara sebanyak 2,658,055 orang atau 106.92%.
8. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata nusantara sebanyak 31,435,592 orang atau 112.81%.
9. Meningkatnya persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu dengan capaian 100%

10. Meningkatnya investasi daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung perekonomian daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip *Good Governance* yang capaiannya mencapai 108.6 triliun atau 197.45% dari target yang ditetapkan.

Dalam tahun mendatang, tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang seluruh jajaran dalam pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan selalu berusaha untuk meningkatnya kinerjanya secara lebih optimal dengan lebih merevitalisasi sumber daya internal yang ada, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada pihak lain yang berkepentingan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, LKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan dijadikan perhatian khusus dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa-masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2017 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi DKI.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1900 TAHUN 2017

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengukur serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 perlu menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1900 TAHUN 2017
Tanggal 13 Oktober 2017

PERJANJIAN KINERJA

UNIT SATUAN KERJA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Mendorong Peningkatan Predikat LAKIP	BB
		2	Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka kematian ibu	30 orang per 100.000 kelahiran hidup
		2	Angka kematian bayi	7,10 bayi per 100.000 kelahiran hidup
		3	Angka Usia Harapan Hidup	76,80 tahun
3	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	1	Angka rata-rata lama sekolah	11,87
4	Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar kepada korban bencana	1	Response time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana	3 jam
5	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	1	Persentase sampah dalam kota yang dapat ditangani secara tepat waktu	100%
		2	Persentase pengurangan timbunan sampah di sumber	15%
6	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja	1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	85% dari seluruh pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Meningkatnya Kurikulum Pelatihan Keterampilan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja	1	Persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan	80% dari jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan
8	Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya	1	Terlaksananya pengerukan sungai	30.486 m
		2	Panjang pengaman pantai yang terbangun	1.099 m
9	Tersedianya jaringan jalan dan trotoar dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota	1	Persentase kondisi jalan dalam kondisi baik pada Jaringan Jalan Arteri/Kolektor Sekunder	98.00%
		2	Panjang trotoar yang terbangun pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder	12.180 m
10	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	1	Jumlah penumpang Bus Transportasi Jakarta per hari	506.000 pnp/hari
11	Meningkatnya Ruang Bagi Sektor Informal pada Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Permukiman	1	Persentase peningkatan luas ruang PKL (m^2) di lokasi binaan dan lokasi sementara	20%
12	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	1	Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media	75%
13	Berkurangnya tingkat risiko/efek negatif akibat kebakaran	1	Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit	82%
14	Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	1	jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online	10.237 wajib pajak
15	Meningkatnya Intensitas dan Inovasi Promosi Pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	2.485.864 orang
		2	Jumlah kunjungan wisata nusantara	31.435.592 orang

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	1	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	99%
17	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	1	Jumlah SDM Aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)	2.000 CPNS
18	Meningkatkan Investasi Daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung Perekonomian Daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip Good Governance	1	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	55 triliun
19	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	1	Skala Indeks Demokrasi	85 poin

Jumlah APBD Tahun Anggaran 2017 : Rp. 70.191.958.203.554

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2017 : Rp. 63.612.303.305.596

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 : Rp. 35.556.556.457.667

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1900 TAHUN 2017
Tanggal 13 Oktober 2017

INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NO	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017
1	Pertumbuhan Ekonomi	6.03% - 6.43%
2	Tingkat Inflasi	4% - 5%
3	PDRB Harga Berlaku	2.452,86 miliar rupiah
4	PDRB Harga Konstan Tahun 2010	1.635,24 miliar rupiah
5	Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	
	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,09%
	B. Pertambangan dan Penggalian	0,18%
	C. Industri Pengolahan	12,49%
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,24%
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04%
	F. Konstruksi	12,58%

NO	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017
	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,78%
	H. Transportasi dan Pergudangan	3,45%
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98%
	J. Informasi dan Komunikasi	10,61%
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,09%
	L. Real Estate	6,56%
	M, N. Jasa Perusahaan	7,61%
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,95%
	P. Jasa Pendidikan	4,95%
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67%
	R. Jasa Lainnya	3,73%
6	Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran	
	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,11%
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,86%
	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,45%
	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	43,25%
	5. Perubahan Inventori	0,84%

NO	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017
	6. Ekspor Barang dan Jasa	13,70%
	7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	44,31%
	8. Net Ekspor Antar Daerah	15,10%
7	PDRB per Kapita	236,44 juta rupiah
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	14,36%
9	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB	16,91%
10	Rasio Dana Perimbangan terhadap PDRB	7,65%
11	APBD	Rp. 70.191.958.203.554
12	ICOR	8,87
13	Kemampuan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	13,97 triliun
14	Peranan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Investasi Total	1,45%
15	Ekspor	
	a. Melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta	46.390.850.590 USD
	b. Produk asal DKI Jakarta	11.538.106.633 USD
16	Impor melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta	71.132.687.000 USD
17	Jumlah Wisman	3.200.000
18	Jumlah Penduduk	10.374.235

NO	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017
19	Kepadatan Penduduk	15.682,42
20	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,1%
21	Jumlah Angkatan Kerja	5.461.870 orang
22	Jumlah Penduduk Bekerja	5.169.170 orang
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,3%
24	Jumlah Penduduk Miskin	389,69 ribu orang
25	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	3,77%
26	Indeks Pembangunan Manusia	79,60%
27	Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	
	- SD/MI	113,40%
	- SMP/MTs	115,50%
	- SMA/MA/SMK	97,00%

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT